

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
SEJAHTERA (UPPKS) DI DESA UDEUNG KAB. PIDIE JAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh :
MASRURRATI
NIM. 180801064**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022/2023**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Masrurrati
NIM : 180801064
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Desa Udeung 15 September 2000

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

UIN
AR - RANIRY

Banda Aceh,

Yang Menyatakan



Masrurrati
NIM. 180801064

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
SEJAHTERA (UPKKS) DI DESA UDEUNG KAB. PIDIE JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Oleh :

MASRURRATI

NIM. 180801064

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu
Politik

Disetujui untuk dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Rizkika Lhena Darwin, MA
NIP. 198812072018032001

Pembimbing II,



Melly Masni, M.I.R
NIP. 199308242020122016

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DI DESA UDEUNG KAP. PIDIE**

JAYA

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Ranirydan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir
UntukMemperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

MASURRATI

NIM. 180801064

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Desember 2023

1 Jumadil Akhir 1445 M

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua



Rizkika Lhena Darwin, M.A.

NIP.198812072018032001

Penguji I



Muhammad Thalal, Lc, M.Si., M.Ed

NIP.197810162008011011

Sekretaris



Melly Masni, M.I.R

NIP.199305242020122016

Penguji II



Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.

NIP. 198603132019031006

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

Nip. 197403271999031005

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. UPPKS merupakan salah satu program yang diusung oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Program BKKBN melakukan pendampingan terhadap kelompok UPPKS dalam rangka membantu mengentaskan kemiskinan pada keluarga pra-sejahtera dengan mendorong program Keluarga Berencana (KB), meningkatkan perekonomian keluarga, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja dampak positif dan negatif dari program UPPKS yang ditawarkan BKKBN terhadap pemberdayaan perempuan di Desa Udeung Kab. Pidie Jaya dan untuk mengetahui pendapat masyarakat di Desa Udeung mengenai program UPPKS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, sampel dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, program UPPKS yang ditawarkan BKKBN di Desa Udeung Kab. Pidie Jaya mempunyai dampak terhadap pemberdayaan perempuan. Namun, dampak yang ditimbulkan dari program ini sendiri tidak jauh dari dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positif dari program UPPKS adalah perekonomian masyarakat terutama para perempuan, di mana mereka dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, menabung dan ikut disertakan dalam proses pengambilan keputusan yang akan diterapkan di Desa Udeung itu sendiri. Adapun dampak negatif dari program UPPKS ini adalah, penyaluran dana yang tidak tepat, penyampaian materi bersifat formalitas saja. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa program UPPKS dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pemberdayaan perempuan jika dikelola dengan benar.

Kata Kunci : *Pemberdayaan Perempuan, Program UPPKS.*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah Subhanallahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karuni-Nya, shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasalam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah ke alam islamiah sehingga skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Di Desa Udeung Kab. Pidie Jaya”** dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

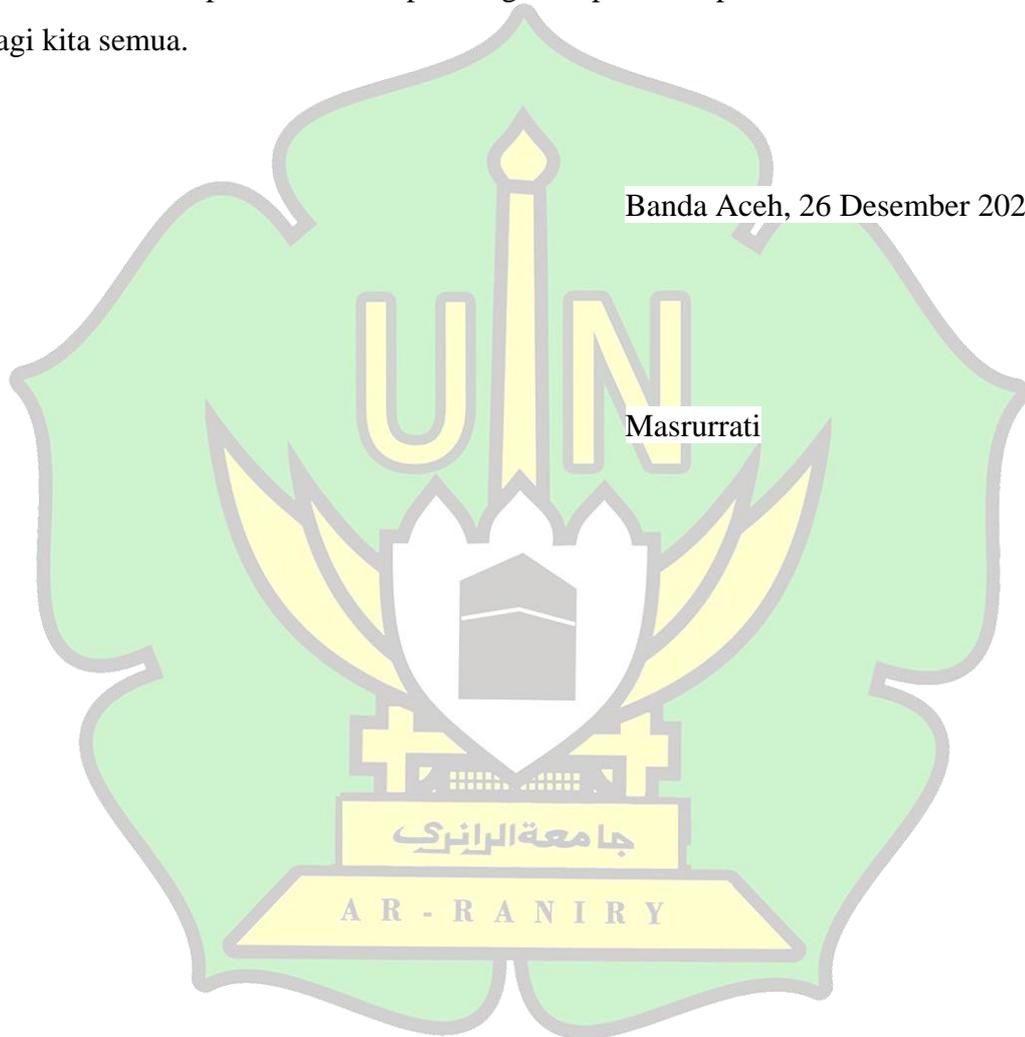
1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I.,M.A selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik.
4. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. Selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan dorongan dan saran dalam pembuatan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir.
5. Ibu Melly Masni, M.I.R. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya dan juga kepada Miwa dan Yahwa beserta seluruh keluarga Ismail puteh, atas kasih sayang serta dukungan dan doa yang selalu diberikan sehingga skripsi ini selesai pada waktunya.
7. Kepada para orang teristimewa terkhusus kakak Rahmi Saputri, Grup Whatshapp Bismillah Wisuda, rekan kerja Univ kopi, dan juga kepada Bripda Aditya yang selalu memberikan semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah selama proses pengerjaan skripsi yang panjang ini.

Penulis sudah semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, terlepas dari semua itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa, masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan sepenuh hati penulis meminta maaf jika ada kesalahan pengetikan dan lainnya di dalam skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 26 Desember 2023

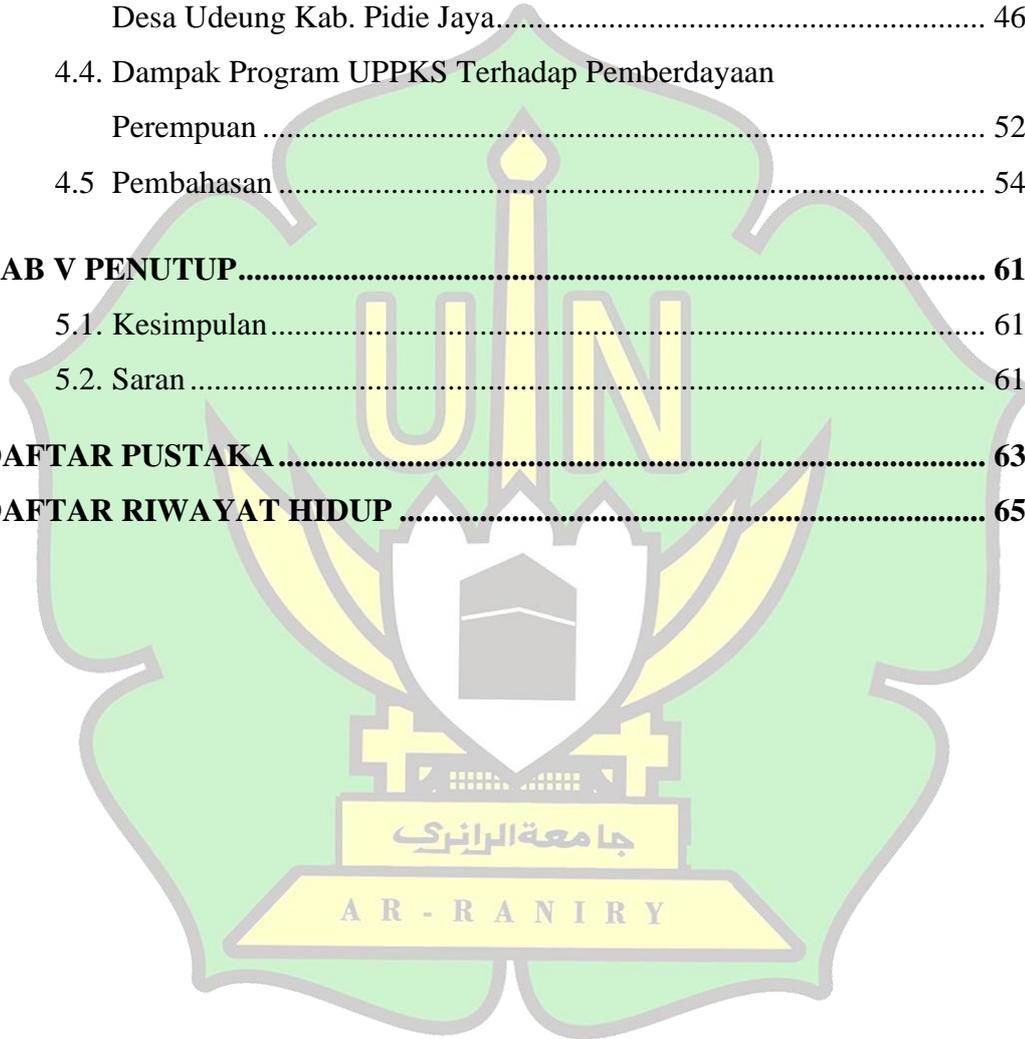
Masurrati



DAFTAR ISI

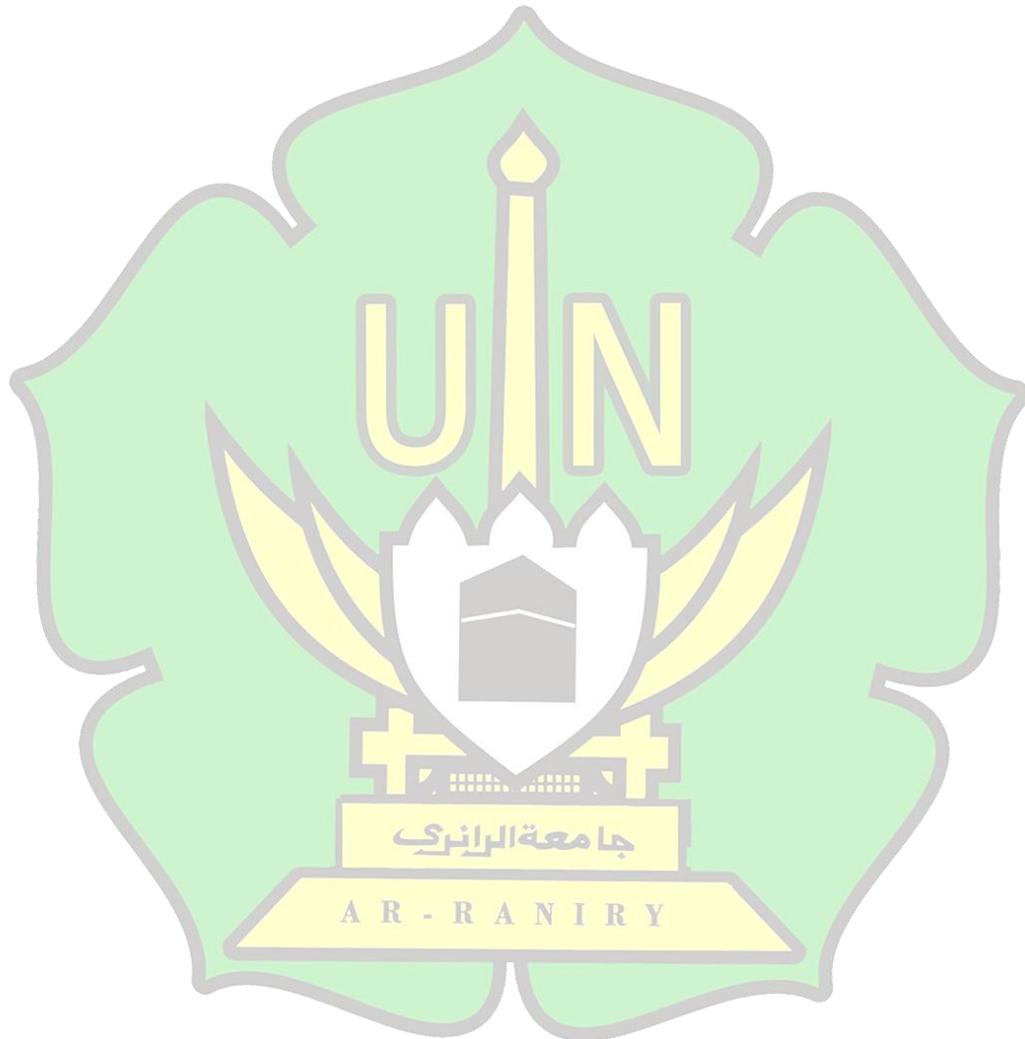
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Gambaran Umum Kemiskinan.....	13
2.3. Dimensi Kemiskinan	15
2.4. Pengentasan Kemiskinan.....	17
2.5. Prinsip Pemberdayaan	18
2.6. Pemberdayaan Masyarakat.....	21
2.7. Pemberdayaan Perempuan.....	25
2.8. Teori Dampak	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Desain Penelitian	37
3.2. Definisi Operasional Variabel	38
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.4. Sumber Data	39

3.5. Teknik Pengumpulan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Perempuan di Pidie Jaya : Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan.....	40
4.2. Program UPPKS	42
4.3. Peningkatan Pendapatan Keluarga Kelompok UPPKS Desa Udeung Kab. Pidie Jaya.....	46
4.4. Dampak Program UPPKS Terhadap Pemberdayaan Perempuan	52
4.5 Pembahasan	54
BAB V PENUTUP.....	61
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65



DAFTAR TABEL

- 4.1. Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pidie Jaya, 2019-2021 42
- 4.2. Daftar Kegiatan UPPKS Desa Udeung Kabupaten Pidie Jaya..... 44



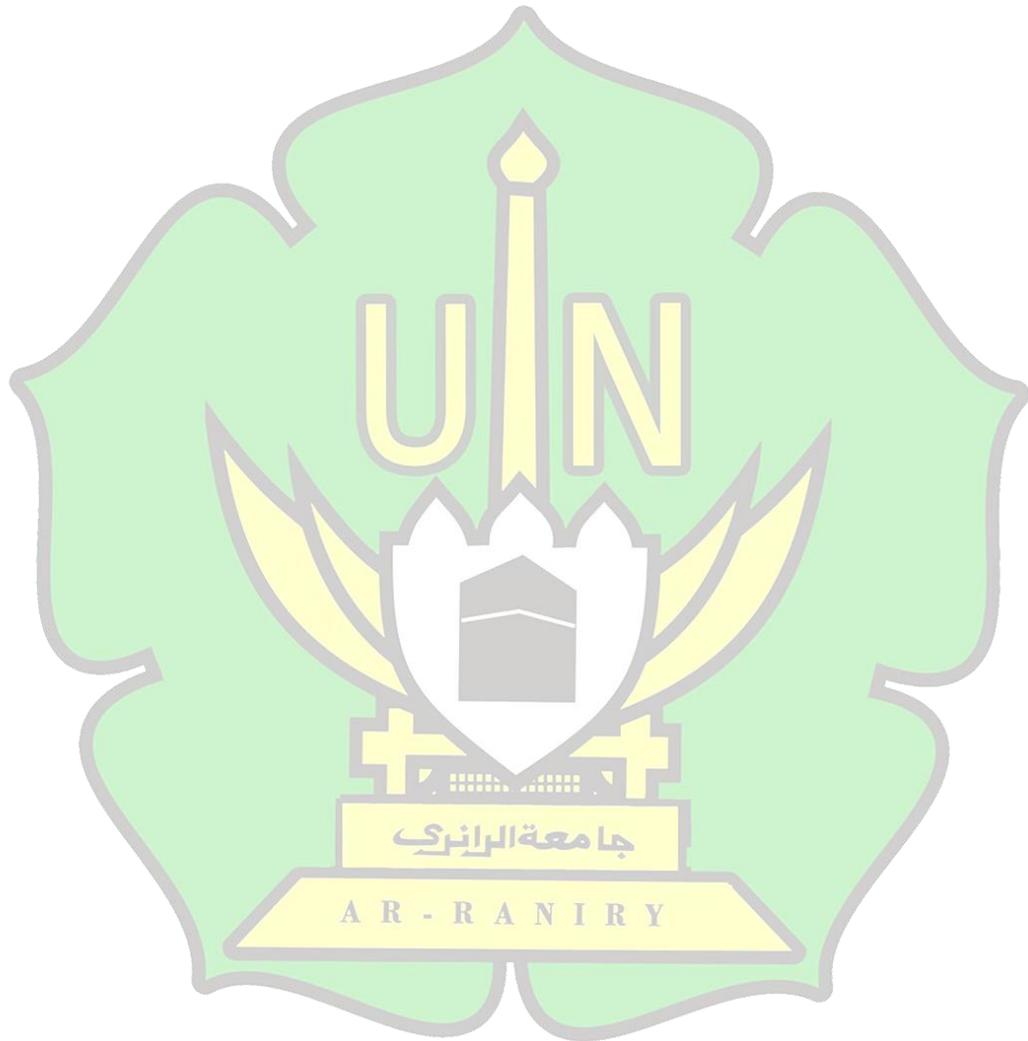
DAFTAR GAMBAR

4.1. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Pidie Jaya dan Aceh, 2019-2021.....	40
4.2. Wawancara dengan Pihak BKKBN.....	55
4.3. Wawancara dengan Geuchik Desa Udeung.....	57
4.4. Wawancara dengan ibu PKK Desa Udeung	58
4.5. Hasil Tambak Masyarakat Desa Udeung	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 67



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan selalu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan, mulai dari penyebab, dampak dan penanggulangannya. Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material seseorang¹. Kemiskinan dapat menyebabkan berbagai masalah sosial dikarenakan kemiskinan berpotensi mendorong individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan. Kemiskinan juga menjadi masalah sosial ketika stratifikasi sosial menciptakan tingkatan dan batasan dalam masyarakat sehingga menimbulkan batasan dalam berinteraksi dan berkomunikasi antara anggota masyarakat.

Pengertian kemiskinan yang populer saat ini adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di dinegara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat dinegara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik. Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar

¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, cet. 4 (Bandung: PT. Refika Adititama. 2014), hlm 134.

daerah. seperti negara-negara berkembang lainnya, kemiskinan adalah perkara besar di Indonesia. tingkat kemiskinan di Indonesia setiap tahun meningkat, menurut data statistik tentang tingkat kemiskinan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan maret 2019 sebanyak 39,90 juta jiwa (17,75%) dibandingkan bulan februari 2018 jumlah penduduk yang mengalami peningkatan sebesar 3,95 juta jiwa.² Berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan telah diadakan oleh pemerintah. Program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung fokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin sehingga program penanggulangan seperti ini tidak tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan haruslah kepada hak artinya negara harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi hak-hak dasar rakyatnya. Meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan layak dan lain-lain.³

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar tentang kemiskinan. Hakekatnya, belum ada keberlanjutan (*sustainability*) sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim.

Adapun dalam tinjauan Islam, kemiskinan dibedakan atas fakir dan miskin. fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi hidup sehari-hari dan orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, pendapat jumbuh ulama menyatakan bahwa golongan fakir

² BPS.Indeks Kemiskinan. <https://www.bps.go.id/> diakses pada 04 Desember 2023

³ Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemsikinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta:Deepublish

adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta memenuhi kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya. Adapun golongan miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya.⁴ Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam melihat kemiskinan sebagai kondisi yang disebabkan dari ketidakcukupan penghasilan seseorang yang kemudian berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan standar, baik bagi dirinya sendiri ataupun orang yang ditanggungnya.

Kemiskinan merupakan fenomena yang lumrah terjadi di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan sering dikaitkan dengan kesejahteraan. Semakin tinggi angka kemiskinan suatu wilayah atau negara semakin rendah angka kesejahteraan begitu juga sebaliknya, semakin rendah angka kemiskinan maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan di daerah tersebut. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari memberikan bantuan uang tunai, bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu, hingga bantuan berupa modal usaha. Salah satu program yang diusung pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan mendirikan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah, maka sebagian tugas dan fungsi serta kewenangan BKKBN didesentralisasikan kepada perangkat daerah yaitu Badan

⁴ Multifiah. 2009. *Analisis Pengaruh Bantuan ZIS Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Muslim yang Miskin (RTMM)*. Unibraw Malang: Jurnal Ekonomi Islam

Keluarga Berencana Daerah (BKBD). Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, BKKBN atau BKBD mempunyai program-program yang berhubungan atau berkenaan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, seperti: program pelayanan keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, program pelayanan kontrasepsi, program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB, program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga serta program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).

UPPKS merupakan salah satu program yang diusung oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Program BKKBN merupakan kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan keluarga atau masyarakat yang saling berinteraksi serta terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari kalangan remaja sampai ibu-ibu rumah tangga. BKKBN yang sebelumnya memiliki fokus utama mengendalikan pertumbuhan penduduk, kini mulai bergerak di bidang peningkatan ekonomi keluarga melalui program UPPKS. Program BKKBN melakukan pendampingan terhadap kelompok UPPKS dalam rangka membantu mengentaskan kemiskinan pada keluarga pra-sejahtera dengan mendorong program Keluarga Berencana (KB), meningkatkan perekonomian keluarga, dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui program ini, BKKBN fokus terhadap kelompok perempuan terutama ibu rumah tangga pra-sejahtera menjadi target utama dalam tujuan UPPKS. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa, perempuan masih menjadi kelompok paling rentan yang terdampak oleh kemiskinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Deputi Kementerian PPN/Bappenas Subandi bahwa, angka kemiskinan

perempuan di hampir semua tingkatan umur dan semua wilayah lebih tinggi dari pada kemiskinan laki-laki. Perempuan juga memiliki potensi mengalami kemiskinan yang lebih panjang disebabkan umur harapan hidupnya yang juga panjang. Berdasarkan hasil penelitian Indraswari, menjelaskan bahwa kemiskinan berkontribusi terhadap semakin tajamnya ketimpangan *gender*, begitu pula sebaliknya, ketimpangan *gender* justru semakin memperparah kemiskinan perempuan.

Perempuan diberdayakan karena banyaknya realita yang berkembang di masyarakat adanya sikap dan tindakan diskriminasi terhadap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga mengakibatkan kaum perempuan harus mengalami hambatan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan bahkan terancam kehidupannya⁵. Pemberdayaan perempuan seringkali dikaitkan dengan isu *gender*. Keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan dapat dikatakan masih sedikit, hal ini dikarenakan perempuan selama ini masih di pandang serta diposisikan sebagai pihak yang lemah dan tak berdaya. Untuk itu, dorongan maupun upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan diperlukan kehadirannya.

Sebenarnya, banyak fakta yang menunjukkan bahwa dalam pembangunan, perempuan seringkali menjadi pihak yang tertinggal. Padahal, terdapat dua indikator keberhasilan pembangunan. Yang pertama, akses dan control akan pembangunan bisa dilakukan atau didapatkan perempuan dan laki-laki. Yang kedua, hasil pembangunan bisa diterima oleh perempuan dan laki-laki secara adil,

⁵ Astrid Wijaya, *Apakah "Gender" Hanya Pemberdayaan Perempuan*. <http://www.p2kp.org/> diakses pada tanggal 05 Desember 2023.

proporsional dan berkelanjutan, baik di area publik maupun domestik⁶. Ketika kedua indikator tersebut berhasil, inilah tanda kesejahteraan perempuan dapat dikatakan meningkat. Dengan adanya kemandirian yang tumbuh dalam diri perempuan diharapkan para perempuan dapat mempunyai posisi baik di keluarga maupun dilingkungan sosialnya.

Keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan, diperlukan adanya suatu upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri perempuan serta pengakuan akan peran pentingnya di dalam pembangunan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas) menyatakan bahwa, perempuan merupakan aset, potensi, dan investasi penting bagi Indonesia. Salah satu bukti potensi yang dimilikinya adalah bahwa pendidikan rata-rata perempuan ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Namun sayangnya, hal tersebut tidak berkorelasi secara positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang hanya tingkat berada di angka 55%.⁷

Pemberdayaan perempuan juga berperan penting terhadap kelangsungan hidup keluarga, baik berkenaan dengan pembinaan moral anak, maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sebagai salah satu pilar utama berlangsungnya kehidupan keluarga. Berkaitan dengan hal tersebut, menunjukkan bahwa kaum perempuan sudah banyak terlibat secara aktif dalam membantu pemenuhan ekonomi keluarga.

⁶ BPPKB Kajen, *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*, <http://bppkbkajen.blogspot.co.id/> diakses pada 05 Desember 2023.

⁷ <https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>

Dalam hal peningkatan ekonomi perempuan khususnya di daerah pedesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga. Selain itu perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu yang seringkali dikenal dengan istilah “*triple burden of women*”, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Salah satunya adalah dengan munculnya wirausaha kaum perempuan di daerah pedesaan. Dilihat dari perspektif gender hal tersebut mengisyaratkan adanya kedudukan dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses wirausaha di pedesaan.

Oleh karena itu, pemberdayaan kelompok perempuan diharapkan dapat membantu para perempuan dalam menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada disekitar untuk membantu keluarga mereka terbebas dari kemiskinan. Hal ini lah yang sekiranya menjadi *output* yang juga diharapkan oleh BKKBN melalui program UPPKS tersebut. Itulah sebabnya pemerintah melalui BKKBN telah menggulirkan bantuan modal usaha serta melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok UPPKS di berbagai desa yang ada di Indonesia, termasuk di Desa Udeung, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Desa Udeung merupakan desa di Kec. Bandar Baru yang menjadi tempat pertambakan ikan dan pertanian, sebagian besar masyarakat di desa ini bermata pencaharian sebagai petani, sebagian dari ibu-ibu merupakan ibu rumah tangga, dengan kategori penghasilan yang sangat sedikit dan bergantung pada hasil panen sehingga, lebih banyak tanggungan dibandingkan pendapatan yang mereka

dapatkan. Purwanto dan Taftazani dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, jumlah tanggungan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.⁸ Hal ini kemungkinan besar menjadi salah satu faktor mengapa ada begitu banyak keluarga pra-sejahtera di Desa Udeung Kec. Bandar Baru dengan jumlah penduduk (1303), rasio jumlah penduduk (0,008097141), skor kinerja (57,62694756), jumlah penduduk miskin (145), rasio penduduk miskin (0,011864823).

Berlandaskan hal tersebut, penulis tertarik untuk melihat bagaimana dampak penerapan program UPPKS yang ditawarkan oleh BKKBN dalam pemberdayaan perempuan di Desa Udeung. Lebih jauh lagi, penulis ingin melihat apakah program ini memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan perempuan dan peningkatan peran perempuan di tengah masyarakat Desa Udeung dan juga dalam ruang domestiknya, serta apakah hal tersebut dapat berkontribusi secara positif terhadap tujuan utama BKKBN yakni dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Selain itu, penulis juga tertarik untuk melihat apa saja faktor pendukung serta penghambat dalam mendorong pemberdayaan perempuan di desa tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dampak program UPPKS pada pemberdayaan perempuan di Desa Udeung, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya?

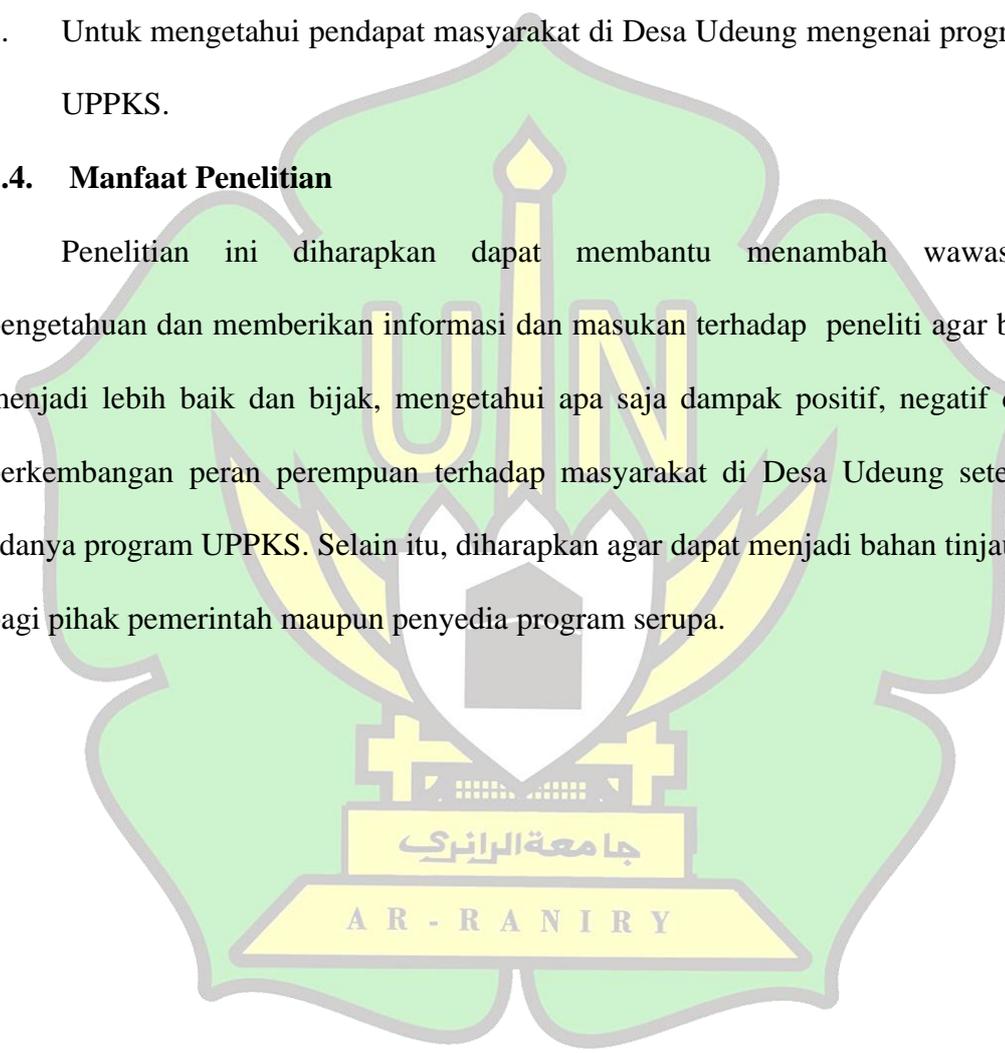
⁸ <http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/download/18255/8549>

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja dampak program UPPKS yang ditawarkan BKKBN terhadap pemberdayaan perempuan di Desa Udeung.
2. Untuk mengetahui dampak positif dan negative dari program UPPKS ini terhadap perubahan pemberdayaan perempuan di Desa Udeung.
3. Untuk mengetahui pendapat masyarakat di Desa Udeung mengenai program UPPKS.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan informasi dan masukan terhadap peneliti agar bisa menjadi lebih baik dan bijak, mengetahui apa saja dampak positif, negatif dan perkembangan peran perempuan terhadap masyarakat di Desa Udeung setelah adanya program UPPKS. Selain itu, diharapkan agar dapat menjadi bahan tinjauan bagi pihak pemerintah maupun penyedia program serupa.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan penelitian yang relevan di harapkan dapat menjadi tolak ukur dan acuan bagi peneliti, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis dalam penyusunan dari penelitian ini.

Pertama, jurnal yang berjudul Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Denpasar Barat hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan prosedur UPPKS berdasarkan indikator variabel *input*, proses dan *output* tergolong sangat efektif sebesar 86,56% dan menunjukkan nilai *probabilitas* atau *p-value* sebesar 0,000 = kurang dari $\alpha = 0,05$ setelah dilakukan analisis dengan menggunakan *McNemar test* sehingga dapat disimpulkan bahwa, terdapat perubahan yang signifikan pada tingkat kesejahteraan responden sebelum dan sesudah mengikuti program UPPKS di kabupaten Denpasar Barat. Pada variabel *input*, jumlah bantuan dan bunga pinjaman perlu ditingkatkan, pada variabel proses, program penyuluhan dan pelatihan lanjutan perlu terus ditingkatkan. Dari segi variabel *output*, program UPPKS perlu ditingkatkan dan dikembangkan ke depan, dan BKKBN lebih memperhatikan pengembangan kegiatan ekonomi produktif dan komersial objek program UPPKS.⁹

⁹ Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni. 2013. Efektifitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Denpasar Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.

Kedua, jurnal yang berjudul Pemberdayaan UPPKS Cendrawasih Berbasis Pencatatan Keuangan di Kota Tanjung Balai, hasil penelitian menunjukkan bahwa, kelompok UPPKS berdasarkan catatan keuangan Badan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Medan sudah berjalan sesuai rencana. Dilihat dari jumlah orang yang terlibat dalam perencanaan (semua peserta terlampir) dan kehadiran peserta, pelaksanaan acara pemberdayaan kelompok UPPKS berdasarkan catatan keuangan di Sekolah Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Medan ini merupakan acara praktis dan sangat permintaan kelompok UPPKS.¹⁰

Ketiga, jurnal yang berjudul tentang Analisis Strategi Pengembangan Minuman Herbal Instan (Studi Kasus: UPPKS Madya XI Karawang). Jurnal ini menjelaskan tentang kajian matriks IFAS, diperoleh hasil skor 0,344 pada faktor kekuatan, yaitu dengan berbagai variasi produk. Sedangkan skor faktor kecacatan sebesar 0,243 menunjukkan bahwa, produk tersebut tidak berizin oleh BPOM. Secara keseluruhan, skor total pada matriks IFAS adalah 3.044 yang menunjukkan bahwa, perusahaan mampu meminimalkan kelemahan dengan kekuatan yang dimiliki sepenuhnya.¹¹

Berdasarkan matriks EFAS diperoleh hasil skor faktor peluang sebesar 0,417 yaitu preferensi masyarakat terhadap minuman instan dan skor faktor ancaman sebesar 0,330 yaitu jumlah produk sejenis dan substitusi yang beredar. Total skor rata-rata pada matriks EFAS adalah 2.695 yang menunjukkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi berbagai

¹⁰ Ali Fikri Hasibuan. 2015. Pemberdayaan UPPKS Cendrawasih Berbasis Pencatatan Keuangan di Kota Tanjung Balai. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.

¹¹ Diana Mawar Rosyda., Arman Arman., 2022. Analisis Strategi Pengembangan Minuman Herbal Instan (Studi Kasus: UPPKS Madya XI Karawang). *Jurnal Bioindustri*.

ancaman yang dihadapinya, mendekati penilaian yang baik, karena nilai 2.687 yang ditunjukkan oleh hasil EFAS adalah mendekati bobot 3 atau kriteria baik. Berdasarkan perhitungan matriks IE, UPPKS Madya XI Karawang menempati posisi sel IV atau *Growth and Build* yaitu strategi tumbuh dan binaan pada matriks tersebut yang menggambarkan bahwa perusahaan berada dalam keadaan atau kondisi sedang atau rata-rata secara eksternal. Selanjutnya berdasarkan hasil matriks QSPM dengan jumlah TAS 5.329 pada peringkat pertama yaitu mempertahankan jaringan dan memperluas koneksi serta meningkatkan jumlah pada distributor. Faktor tersebut menjadi salah satu alternatif strategi yang dapat digunakan oleh Perusahaan.

Keempat, jurnal yang berjudul Pengaruh Perempuan Daerah Melalui *Community Development* (Comdev) UPPKS Terhadap Kemiskinan Ngoro Kabupaten Jombang menjelaskan bahwa, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jombang Kecamatan Ngoro memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan daerah. Jurnal ini menjelaskan tentang UPPKS Comdev tidak berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jombang Kecamatan Ngoro, kurangnya dampak program Comdev UPPKS di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dikarenakan aspek peningkatan wawasan dan pengetahuan, aspek gaya kepemimpinan yang diterapkan dan aspek pemberian bantuan dana dan kurangnya bantuan ATTG yang diterima (alat teknis yang tepat).

Kelima, jurnal yang berjudul Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Padang Panjang, jurnal ini menjelaskan tentang program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) diberikan kepada

masyarakat miskin yang dikhususkan kepada ibu-ibu/wanita berupa bantuan modal usaha dalam rangka pengembangan usaha yang dijalankan dan sebagai modal bagi anggotanya tersebut untuk membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatannya.¹²

Pelaksanaan program UPPKS telah sesuai dengan prosedur yang ada namun belum sepenuhnya mampu menyebabkan kesejahteraan anggota kelompok di Kota Padang Panjang sudah terlaksana namun, pengawasan terhadap program masih lemah, modal yang diberikan pemerintah rendah, selain itu pembinaan yang belum merata. Mekanisme UPPKS dimulai dari tahap persiapan sampai kepada pelaksanaan, seperti kreatifitas dan inovasi dalam mencari dan memanfaatkan dana pinjaman, dan pengelolaan administrasi dan keuangan.

2.2. Gambaran Umum Kemiskinan

Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu hasil bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari UU No 40/2004 tersebut terlihat bahwa upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat adalah salah satu program yang harus dilakukan oleh pemerintah meskipun bertahap. Beberapa program yang saat ini dijalankan dengan simultan adalah penyediaan perumahan murah, kesehatan dan pendidikan gratis bagi keluarga miskin, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat, juga harus melihat potensi yang dimiliki di wilayah sekitar, baik sumber daya alam maupun sumber

¹² Muntaha Mardhatillah. 2021. Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKKS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*.

daya manusia. Apabila sudah mengetahui potensi wilayah tersebut, maka akan mampu mengetahui pula daya saing atau keunggulan dari wilayah tersebut, sehingga masyarakat di sekitar wilayah tersebut akan merasa sejahtera karena masyarakat mampu memiliki penghasilan yang cukup atau tidak dikatakan miskin.

Terdapat dua macam kemiskinan, yakni kemiskinan yang bersifat relatif dan kemiskinan yang bersifat absolut (*relative and absolute poverty*). Kemiskinan absolut adalah ukuran kemiskinan yang menggunakan indikator-indikator empiris seperti tingkat kelaparan, malnutrisi, buta huruf, perkampungan kumuh, buruknya tingkat kesehatan, dan lain-lain. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan diukur relatif antar kelompok pendapatan, oleh karenanya selalu dinamis. Hakikat kemiskinan ini tidak dilihat dari indikator-indikator ekonomi, namun menyangkut aneka dimensi sosial.

Masalah kemiskinan dapat dikatakan multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan. Akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek diluar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Lebih lanjut kompleksitas dari kemiskinan bukan saja berhubungan dengan pengertian dan dimensinya saja tetapi juga berkaitan dengan

metode pengukuran dan intervensi kebijakan yang diperlukan dalam mengentaskan masalah ini.¹³

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensi, sehingga secara umum masyarakat miskin adalah suatu kondisi masyarakat yang berada dalam situasi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya secara layak. Mengingat persoalan struktural dan multidimensi tersebut, maka upaya penanggulangan seyogyanya diletakkan dan dipercayakan kepada masyarakat itu sendiri, tentunya dengan didukung dan difasilitasi oleh pemerintah, maupun pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil lainnya, sehingga proses penanggulangan kemiskinan kan menjadi suatu gerakan masyarakat yang akan menjamin potensi kemandirian dan keberlanjutan guna meningkatkan kehidupannya yang lebih layak.¹⁴

Selanjutnya salah satu rekomendasi hasil penelitiannya adalah model penanggulangan kemiskinan partisipatif yaitu yang berasal masyarakat terutama perempuan miskin dan tokoh masyarakat adalah alternatif yang perlu diuji coba. Model ini dimulai dari kegiatan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang perempuan miskin, perencanaan dan pelaksanaan program dengan prinsip adil, partisipatif, dan berorientasi pemecahan masalah, kelembagaan terpadu dan monitoring serta evaluasi periodik dan berkelanjutan.¹⁵

2.3. Dimensi-Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya mencakup persoalan materi saja, namun juga masalah- masalah non ekonomi. Karena sifatnya yang multidimensi, maka

¹³ Suparjan & Hempri, S. 2013. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaa*. Yogyakarta: Adita Media

¹⁴ Sukesi, Keppi. 2015. *Gender dan Kesiskinan di Indonesia*. Malang: UB Press

¹⁵ Sukesi, Keppi. 2015. *Gender dan Kesiskinan di Indonesia*. Malang: UB Press

kemiskinan tidak hanya menyangkut kesejahteraan sosial. Adapun definisi kemiskinan dari beberapa dimensi, dikemukakan di bawah ini adalah:¹⁶

1. Kemiskinan Berdimensi Ekonomi

Kemiskinan Absolut, suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang atau sekelompok orang masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, namun secara relatif pendapatannya masih dibawah rata-rata penduduk sekitarnya.

2. Kemiskinan Berdimensi Sosial-Budaya

Kemiskinan Kultural, suatu kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, fatalistik dan sebagainya.

3. Kemiskinan Berdimensi Struktural atau politik

Kemiskinan struktural atau Politik, kemiskinan ini muncul sebagai akibat masyarakat miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.

Dimensi-dimensi kemiskinan ini, pada hakekatnya sebagai gambaran bahwa sumber awal masalah kemiskinan adalah kondisi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan diasumsikan sebagai sumber masalah utama terjadinya kemiskinan yang kemudian membawa implikasi pada faktor-faktor pendukung

¹⁶ Sunartiningsih, Agnes (ed). 2004. *Memberdayakan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal*. Yogyakarta: Aditya Media.

kemiskinan yang lain. Ketidakberdayaan pada aspek ekonomi ditandai oleh terbatasnya aset khususnya faktor produksi, rendahnya tingkat upah, posisi tawar yang rendah serta kemampuan yang rendah dalam merespon peluang ekonomi.

Ketidakberdayaan ranah politik dapat dilihat dari kecilnya akses dalam proses pengambilan keputusan, lemahnya posisi tawar membela hak politik sehingga terjadi diskriminasi. Sementara ketidakberdayaan secara sosial ditandai dengan rendahnya akses terhadap informasi dan pelayanan sosial, program lemahnya interaksi sosial sehingga masyarakat menjadi termarjinalkan. Kemudian ketidakberdayaan kultural ditandai dengan lemahnya daya dukung dan daya dorong nilai kultural terhadap usaha peningkatan kondisi kehidupan.

Berbagai bentuk ketidakberdayaan tersebut, mengakibatkan lapisan masyarakat miskin mengalami hambatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat miskin akan dihindangi rasa malas, apatis, memiliki sikap *dependency* atau tanpa ketergantungan terhadap pemerintah, sehingga masyarakat tidak mempunyai kemandirian untuk melakukan perbaikan hidup yang lebih baik.

2.4. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan masalah kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk memotong mata rantai penyebab-penyebab kemiskinan. faktor-faktor yang diidentifikasi membentuk jaringan kemiskinan diantaranya adalah kelemahan fisik, isolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan. Faktor apa yang harus memperoleh prioritas atau pemotongan mata rantai penyebab kemiskinan harus dimulai dari mana, sangat tergantung pada kondisi masyarakat dan kawasan yang bersangkutan. Upaya pemotongan salah satu mata rantai tersebut akan efektif

dalam rangka pengentasan kemiskinan apabila memiliki dampak berantai terhadap faktor-faktor lain yang terkait dengan jaringan kemiskinan tadi. Dalam hal program-program yang ditujukan secara langsung untuk menangani masalah kemiskinan dalam jangka panjang mungkin tidak efektif apabila program tersebut tidak diikuti dengan pemberdayaan sosial dan politik.¹⁷

Pengaruh utama pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat ini muncul mengingat kegagalan program-program pembangunan masyarakat di masa lalu. Belajar dari pembangunan masa lalu, banyak program pembangunan yang manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat pada lapisan paling bawah. Salah satu penyebabnya adalah program tersebut kurang relevan dengan persoalan dan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena dalam perumusan dan penentuan program, masyarakat pada tingkat terbawah tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga aspirasi, kepentingan dan kebutuhan mereka tidak terakomodasi dalam program. Kondisi ini merupakan pemborosan energi dan sumber daya pembangunan di samping manfaat pembangunan menjadi tidak tepat sasaran karena tidak dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat yang seharusnya lebih diprioritaskan. Melalui penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan ini secara baik diharapkan persoalan kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan masyarakat dapat diatasi.

2.5. Prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut ife yang dikutip oleh Edi Suharto dalam bukunya menjelaskan bahwa, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni, kekuasaan dan kelompok lemah. Secara konseptual pemberdayaan

¹⁷ Suparjan & Hempri, S. 2013. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaa*. Yogyakarta: Adita Media

(*empowerment*) merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan¹⁸.

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga, mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam artian bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan. (b) menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka¹⁹.

Pemberdayaan dan kekuasaan memang erat kaitannya, individu atau kelompok memiliki dan menggunakan kesempatan untuk meraih kekuasaan dari kaum 'berpunya' kepada kaum 'tidak berpunya' dan seterusnya. Berikut jenis-jenis kekuasaan yang dikutip dari Jim Ife dalam bukunya :²⁰

1. Kekuasaan atas Pilihan Pribadi dan Peluang Hidup : Strategi pemberdayaan akan berupaya memaksimalkan pilihan-pilihan efektif orang, dalam rangka untuk meningkatkan kekuasaan mereka atas keputusan-keputusan yang menyangkut masa depan pribadi mereka.
2. Kekuasaan untuk Mempertahankan HAM : Suatu proses pemberdayaan akan menjamin bahwa suara orang tertindas dan termarginalkan akan

¹⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosia, cet. 4* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 59.

¹⁹ Ibid., hlm. 58.

²⁰ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisai* ed. Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 140-144.

didengar dan akan terlibat dalam strategi aksi sosial dan politik untuk menuntut bahwa hak-hak pihak lain dipertahankan.

3. Kekuasaan atas Definisi Kebutuhan : Suatu perspektif pemberdayaan akan membutuhkan pemberian kekuasaan masyarakat untuk mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri. Kebutuhan juga mensyaratkan pengetahuan dan keahlian yang relevan. Oleh karena itu, proses pemberdayaan tersebut mensyaratkan bahwa, masyarakat memiliki akses kepada pendidik dan informan.
4. Kekuasaan atas Gagasan : Suatu proses pemberdayaan harus memasukkan kekuasaan untuk berpikir secara otonom dan tidak mendikte pandangan dunia seseorang baik dengan paksaan atau dengan penyangkalan atas akses kepada kerangka acuan alternatif.
5. Kekuasaan atas Lembaga-Lembaga : Strategi pemberdayaan masyarakat harus bertujuan meningkatkan kekuasaan masyarakat atau lembaga dengan cara membekali masyarakat agar memiliki dampak terhadap lembaga menjadi lebih mudah diakses.
6. Kekuasaan atas Sumber Daya : Strategi pemberdayaan harus berupaya memaksimalkan kekuasaan efektif bagi setiap orang atas distribusi dan pemanfaatan sumber daya dan memperbaiki ketidakadilan yang terjadi antar akses kepada sumber daya yang merupakan ciri masyarakat modern.
7. Kekuasaan atas Kegiatan Ekonomi : Proses pemberdayaan berupaya memastikan bahwa kekuasaan atas kegiatan ekonomi didistribusikan dengan lebih merata.

8. Kekuasaan atas Reproduksi : Kekuasaan atas proses reproduksi terdistribusi secara tidak adil dalam masyarakat kontemporer dan sekali lagi perbedaan-perbedaan kelas, ras dan gender adalah penting,²¹

2.6. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan mempunyai makna harafiah membuat seseorang dan kelompok berdaya, istilah lain untuk memberdayakan adalah penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Didalam pemberdayaan terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegasan hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Proses pemberdayaan diusahakan agar orang lain berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidak seimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Lahir dan berkembangnya konsep *empowerment* memerlukan sikap dan wawasan yang mendasar, jernih serta kuat mengenai kekuasaan atau power itu sendiri. Kerancuan yang menyertai perkembangan konsep *empowerment* itu tidak saja disebabkan oleh adanya berbagai versi dan bentuk empowerment tetapi juga disebabkan karena tumbuh dan berkembangnya konsep empowerment tersebut tidak disertai dengan terjadinya refleksi mendasar secara jernih dan kritis terhadap konsep kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu memahami soal pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dengan memahami tentang kekuasaan atau

²¹ *Ibid.*, hlm. 140-144

power, orang yang tidak berdaya dapat berdaya dapat disebut sebagai orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Kekuasaan disini berarti menguasai sesuatu, sehingga mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu.

Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya membangkitkan daerah yang miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan mendampingi perempuan untuk peningkatan potensi perempuan yang telah ada, melalui pengembangan usaha produktif dan diversifikasi hasil lokal secara berkelompok. Dalam proses pemberdayaan perempuan ini diajak untuk mengenali dulu apa yang menjadi kebutuhan riil perempuan baik kebutuhan praktis maupun kebutuhan strategis, dan permasalahannya. Dengan mengetahui kebutuhannya sendiri diharapkan mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Sehingga perempuan sendirilah yang menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari solusi yang ditentukan.

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Terkait dengan pemahaman ini, perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.²²

²² Mardikanto & Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²³

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru

²³ Suharto, Edi. 2013. Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial. Bandung: Mizan.

pembangunan yang bersifat *people-centered, partipatory, empowering, and sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut. Proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu:²⁴

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*).
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidak berdayaan (*discuss reason for depowerment/empowerment*).
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*).
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*).
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

Dalam konteks kesejahteraan sosial, upaya pemberdayaan yang digambarkan Hogan di atas tentunya juga terkait dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dari suatu tingkatan ke tingkat yang lebih baik. Tentunya dengan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan suatu komunitas menjadi kurang berdaya (*depowerment*).

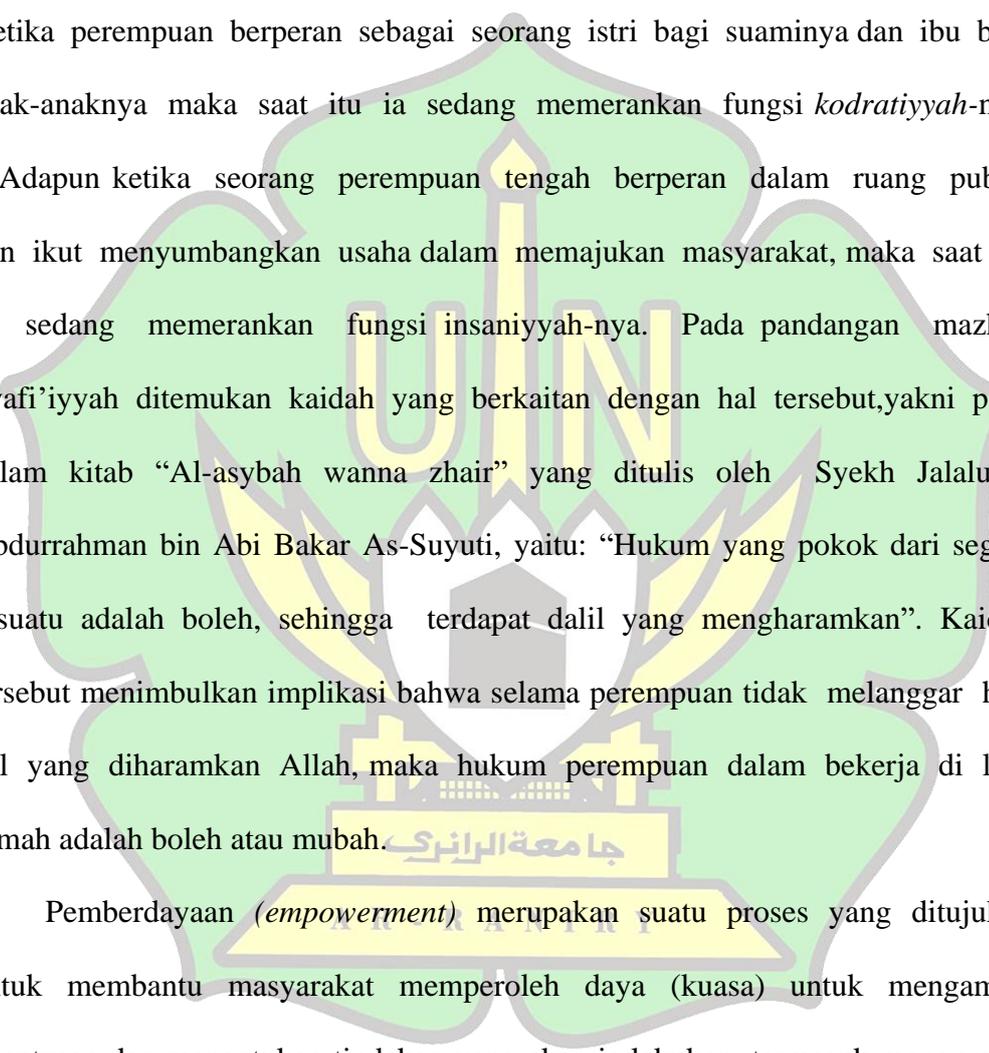
Adapun pemberdayaan ekonomi rakyat adalah upaya yang merupakan pengalihan sumberdaya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktifitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun

²⁴ Suharto, Edi. 2013. *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan.

sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2.7. Pemberdayaan Perempuan

Perempuan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi kodratiah dan insaniyah. Ketika perempuan berperan sebagai seorang istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya maka saat itu ia sedang memerankan fungsi *kodratiah*-nya.

²⁵ Adapun ketika seorang perempuan tengah berperan dalam ruang publik dan ikut menyumbangkan usaha dalam memajukan masyarakat, maka saat itu ia sedang memerankan fungsi insaniyah-nya. Pada pandangan mazhab Syafi'iyah ditemukan kaidah yang berkaitan dengan hal tersebut, yakni pada dalam kitab "Al-asybah wa'n-nazhair" yang ditulis oleh Syekh Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, yaitu: "Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan". Kaidah tersebut menimbulkan implikasi bahwa selama perempuan tidak melanggar hal-hal yang diharamkan Allah, maka hukum perempuan dalam bekerja di luar rumah adalah boleh atau mubah. 

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu proses yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Suatu pemberdayaan

²⁵ Qudsiah, W. L. & Gustiawati, S. (2017). Peranan wanita karir dalam membantu kebutuhan keluarga menurut mazhab Syafi'iyah. Mizal Journal of Islamic Law, 1(2), 155-172.

tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*).²⁶

Pemberdayaan perempuan adalah upaya memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan. Program pemberdayaan perempuan di Indonesia pada hakekatnya telah dimulai sejak tahun 1978. Dalam perkembangannya upaya dalam kerangka pemberdayaan perempuan ini secara kasat mata telah menghasilkan suatu proses peningkatan dalam berbagai hal. Seperti peningkatan dalam kondisi, derajat, dan kualitas hidup kaum perempuan di berbagai sektor strategis seperti bidang pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, kesehatan dan keikutsertaan ber-KB.

Pengelola program dalam hal ini adalah perempuan dusun yang memberdayakan individu dan masyarakat baik formal maupun non-formal dapat disebut sebagai agen pemberdayaan (*agent of empowerment*). Pada RPJP Nasional dan RPJM Daerah menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan menjadi salah satu program prioritas dalam rangka pembangunan nasional. Kondisi demikian dapat meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan, serta mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Hal lain yang didapatkan yakni meningkatnya kualitas peran dan kemandirian perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sehingga dengan kata lain, memberdayakan perempuan berarti memberdayakan suatu bangsa.

²⁶ Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2018. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Program pemberdayaan perempuan dusun berupa pelatihan pengolahan bahan pangan lokal dusun yang tidak mengesampingkan proses pendampingan dalam proses pelatihan. pelatihan merupakan peran edukatif yang paling spesifik, karena hal tersebut melibatkan bagaimana mengajarkan penduduk untuk melakukan sesuatu. Pelatihan berperan dalam meningkatkan keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kualitas hidupnya. Selain dari hal tersebut, dalam pemberdayaan masyarakat tentunya tidak serta merta hanya membuat suatu pelatihan saja, tetapi perlu adanya tindak lanjut yang berupa tindakan nyata secara bertahap dan berkesinambungan setelah pelatihan diberikan. Tindak lanjut akan berjalan lebih efektif jika adanya suatu pendampingan yang berkelanjutan.

Dalam pendampingan diperlukan agen pemberdayaan yang tugasnya bukan menggurui, tetapi lebih tepatnya sebagai fasilitator, komunikator, dinamisator, dan pembimbing masyarakat di lapangan. Agen pemberdayaan bertujuan untuk membantu masyarakat untuk menemukan potensi mereka. Pendampingan akan lebih maksimal ketika berasal dari masyarakat itu sendiri karena secara waktu dan tempat akan lebih mudah terjangkau. Kemudian pendampingan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat, seperti mengidentifikasi masalah, memecahkan masalah, mengambil keputusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu tujuan dari pemberdayaan perempuan yaitu untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan bentuk kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan, masyarakat, berbangsa dan bernegara, berbagai peran yang dikonstruksikan oleh sosial budaya masyarakat seharusnya

terlepas dari tindakan diskriminasi. Sehingga laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengapresiasi kewajiban dan haknya²⁷.

Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Kebutuhan praktis yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar yaitu seperti pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Pemenuhan kebutuhan praktis dapat dilakukan dengan cara peningkatan sumber manusia. Contoh dari kebutuhan praktis itu sendiri yaitu seperti pelatihan-pelatihan, kesempatan meningkatkan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pelayanan kesehatan. Sedangkan kebutuhan strategis adalah kebutuhan yang muncul dari posisi subordinat perempuan yang tidak menguntungkan dalam masyarakat. Contoh dari kebutuhan strategis yaitu seperti hak atas hukum dan persamaan gaji. Pemenuhan kebutuhan strategis dapat dilakukan dengan cara memperkuat kelembagaan ekonomi berbasis perempuan melalui peningkatan kapasitas kader-kader perempuan²⁸. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) masuk dalam kategori kebutuhan praktis, hal ini dikarenakan tujuan dari UPPKS yaitu meningkatkan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Perbaikan ekonomi dan perbaikan status yang dalam hal ini adalah hak perempuan, baik secara individual maupun kolektif memperjuangkan dan melindungi hak mereka serta dapat mempengaruhi arah dan tujuan perubahan

²⁷ Remiswal, *Menggugat Partisipasi Gender Di Lingkungan Komunitas Lokal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 8

²⁸ Titik Sumarti, "*Strategi Nafkah Rumah Tangga dan Posisi Kaum Perempuan*" dalam *secercah Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan (Sebuah Kajian)*, Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Keluarga (tkp:2010), hlm 212.

sosial yang terjadi dalam masyarakatnya. Persyaratan itulah yang harus dipenuhi oleh setiap strategi pengembangan kelompok perempuan²⁹

Pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk masyarakat agar menjadi maju (berdaya) dengan maksud untuk memotivasi seseorang atau kelompok agar mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya. Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang berkurang atau belum memiliki daya, sehingga dapat disimpulkan bahwa, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok maupun individu yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Tutik Sulistyowati di dalam jurnalnya yang dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjelaskan bahwa, pemberdayaan perempuan merupakan upaya memajukan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial dan budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan serta berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.³⁰

Pemberdayaan juga merupakan sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan

²⁹ Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Hlm 92-93.

³⁰ Tutik Sulistyowati, "Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesional dan Daya Saing untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja". *Jurnal Perempuan dan anak*, 1 (1): Januari 2015) 4

didefinisikan sebagai, proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang artinya keberadaan dan kekuasaan yang berarti, pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat menjadi dan mampu menguasai keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses di mana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. Kontrol ini meliputi berbagai macam sumber mencakup fisik dan intelektual serta ideologi meliputi yang keyakinan, nilai dan pemikiran.³¹

Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. *Pertama*, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. *Kedua*, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi. Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik didomain publik maupun domestik.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga

³¹ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, Cet. Ke-1(Bandung: Mizan ,2003)hlm,35

Zakiah, *Pemberdayaan Perempuan*,44

2. Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan. Sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki laki. Adapun keterampilan yang bisa diajarkan diantaranya keterampilan memasak, menjahit, menyulam dan berwirausaha dengan mengolah berbagai hasil panen seperti udang menjadi kerupuk dan makanan lainnya dengan harga jual yang lebih meningkat.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi tingginya pendidikan perempuan nantinya akan kembali ke dapur, inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan³².

Dewasa ini, untuk mengetahui tingkat berdayanya kaum perempuan terdapat beberapa indikator. Indikator tersebut terdiri dari dua faktor yaitu³³ :

a. Faktor Kultural

- Perempuan wajib dalam pekerjaan domestik : Anggapan ini mengacu pada tugas perempuan hanya sebatas mengurus rumah, suami dan anak-anaknya.
- Masih kuatnya budaya patriarki : Masih banyaknya stigma masyarakat bahwa, kedudukan perempuan masih jauh dibawah laki-laki.

b. Faktor Struktural

- Akses terhadap informasi : Informasi menjadi sarana penting bagi perempuan untuk mengembangkan wawasannya untuk berpartisipasi

³² Ismah Salman, *Keluarga Sakinah dalam ...*, hlm. 104

³³ Remiswal, *Menggugat Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*., Hlm 23-25

dalam pembangunan. Namun, nyatanya masih jauh dari kata cukup informasi yang dapat diakses oleh para kaum perempuan

- Penerima manfaat : Perempuan seringkali dijadikan objek, padahal seharusnya dalam pembangunan perempuan juga harus dijadikan subjek. Dalam hal ini tidak hanya sebagai penerima manfaat namun perempuan juga harus turut berpartisipasi dalam pemberian manfaat tersebut.
- Pendominasian partisipasi dari kaum elit : masih terdapatnya anggapan bahwa perencanaan pembangunan adalah urusan elit, mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, provinsi dan pusat.
- Ketimpangan hak perempuan dalam pendidikan : Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa menyekolahkan anak laki-laki akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan menyekolahkan anak perempuan. Pernyataan seperti ini tentunya pernyataan yang sama sekali tanpa dasar yang jelas³⁴

Terdapat empat prinsip pemberdayaan yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu :

a. Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip utama dari proses pemberdayaan. Kesetaraan yang dimaksud adalah adanya kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan dan pengalaman serta keahlian satu sama lain.

³⁴ *Ibid.*, hlm 23-24.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat memstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat.

c. Keberlanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan di bandingkan dengan masyarakat sendiri namun, secara perlahan dan pasti peran pedamping akan semakin berkurang.

d. Kemandirian

Prinsip kemandirian adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada kemampuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan melainkan sebagai objek yang memiliki kemampuan sedikit.³⁵

2.8. Teori Dampak

Pengertian teori dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh atau benturan yang mendatangkan akibat baik (positif) maupun (negatif).³⁶. Secara sederhana dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang di ambil oleh seseorang baik itu dampak positif atau negatif. Dampak juga merupakan proses lanjutan dari sebuah

³⁵ Anityas Dian Susanti, *Pola Partisipasi Warga dalam Pengembangan Desa Wisata Umbul Sidomukti Kabupaten Semarang*, (Universitas DIponegoro: ISSN: 08532877, Vol. 15 No. 1 Januari- Juni 2015) hlm.48

³⁶ Suharto dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang; Widya Karya,2002) hlm 243.

pelaksanaan pengawasan internal. Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu:

a. Pengertian dampak positif

Dampak merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan, agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif daripada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme daripada pesimisme³⁷. Adapun positif merupakan pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pengertian dampak positif yaitu kemampuan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi ataupun memberi kesan kepada orang lain, dengan sebuah tujuan atau maksud agar mereka mengikuti dan mendukung keinginan yang baik.³⁸

Dampak positif dalam Ekonomi Menurut Kepdirjen No. 438/KN/2020 adalah manfaat yang diperoleh secara langsung bagi negara dan masyarakat dari objek analisis yang dapat diukur dalam bentuk uang. Dampak suatu kegiatan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung atau dampak

³⁷ *Ibid*, hlm. 236.

³⁸ *Ibid*, hlm 134.

primer merupakan dampak yang timbul sebagai akibat dari tujuan utama kegiatan atau kebijakan tersebut baik berupa biaya ataupun manfaat.

Identifikasi dampak secara fisik akan memberikan manfaat analisis yang lebih tinggi apabila dampak tersebut dapat dinyatakan dalam nilai uang. Lebih lanjut penilaian atau valuasi ekonomi dapat dilakukan setelah evaluasi dampak suatu kebijakan atau kegiatan dilakukan. Penilaian ini menghasilkan indikasi nilai atau rasio yang digunakan untuk menyatakan apakah suatu kebijakan atau kegiatan itu layak atau tidak layak.

Dampak Ekonomi adalah pengaruh tidak langsung dari objek analisis terhadap jumlah dan jenis kegiatan ekonomi disuatu wilayah yang berfokus pada indikator makro ekonomi dan prakiraan pengaruh proyek pada indikator-indikator tersebut bagi negara dan masyarakat.

b. Pengertian Dampak Negatif

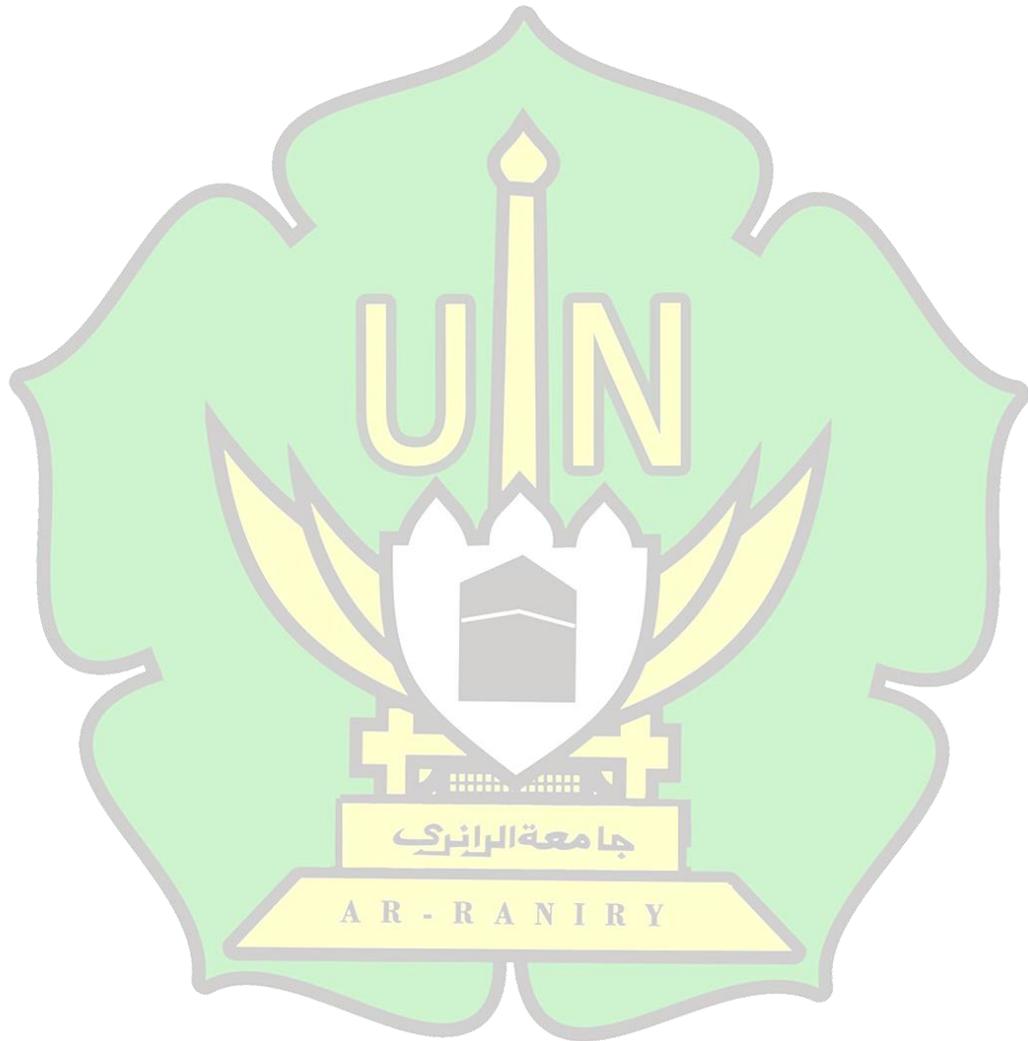
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif.³⁹ Dampak merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi dan memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan terhadap hal buruk maupun hal-hal yang dapat menimbulkan akibat tertentu.⁴⁰ Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah dapat disimpulkan bahwa, dampak negatif adalah oengaruh buruk yang lebih besar akibatnya dibandingkan dengan dampak positifnya.

Sehingga dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang

³⁹ *Ibid.*, hlm 236.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 567.

lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, jenis penelitian ini dipilih karena dapat menjelaskan dan mendeskripsikan sebagai fenomena yang terjadi di lapangan yaitu tentang objek dan permasalahan yang diteliti sebagai gambaran tentang proses pemberdayaan perempuan pada kelompok UPPKS Jaya Udeung di Desa Udeung Kecamatan Bandar Baru.

Pada penelitian ini sampel dipilih dengan sistem *purposive sampling* di mana penentuan sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu dan apabila sampel pertama data yang digunakan belum terasa lengkap, maka akan digunakan *snowball sampling* di mana penentuan jumlah sampel bermula sedikit kemudian membesar dengan mencari informan lain yang dapat melengkapi data sehingga jumlah sumber data akan bertambah dari sebelumnya. Adapun yang menjadi partisipan dalam penelitian ini adalah anak dari salah satu pendamping anggota pengurus UPPKS Jaya Udeung.

1. Pendamping pertama pendamping lapangan yaitu Geuchiek desa Udeung Bapak Muhammad Yunus.
2. Ketua kelompok UPPKS Jaya Udeung yaitu Ibu Badri sekaligus Ibu Geuchik Desa Udeung beserta anggota kelompoknya.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Fokus penelitian membahas tentang dampak program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan di Desa Udeung Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Udeung, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.

3.4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Udeung Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, untuk melihat dampak program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan.

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta maupun yang disajikan dalam bentuk bahan untuk menyusun informasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari sumber utamanya atau aslinya. Data tersebut diperoleh atau bersumber dari keterangan dari keterangan informan . Informan adalah orang yang diwawancarai, dan dimintai informasi oleh pewawancara, orang-orang yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah data primer. Sumber data sekunder sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan

mengumpulkannya, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, buku-buku, majalah ilmiah, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, koran, makalah, artikel dari internet dan lain-lain.

Bedasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa, data primer dan data sekunder diharapkan dapat membantu penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data sekunder diharapkan dapat mempertegas teori dari kesenjangan praktek yang peneliti lakukan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Menurut Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar segala ilmu, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan lebih lanjutnya observasi tidak berstruktur maksudnya di dalam pengamatan penelitian ini tidak menggunakan instrumen yang telah baku.

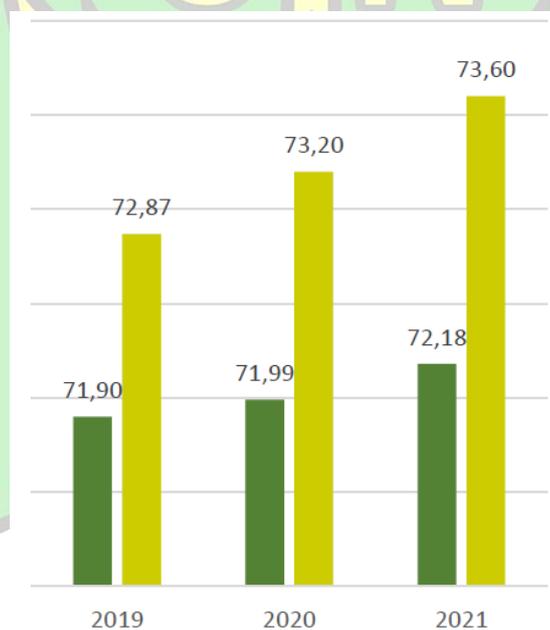
b. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih yang bertukar informasidan pikiran dengan maksud tertentu. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Geuchiek Desa Udeung, Ibu Geuchiek Desa Udeung, ibu PKK, beserta ibu-ibu anggota Jaya Udeung UPPKS.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perempuan di Pidie Jaya: Kondisi Sosial, Ekonomi dan Pendidikan

Kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan pada tingkat Gampong di Kab. Pidie Jaya pada kalangan perempuan dapat dilihat atau dinilai dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengetahui sejauh mana pembangunan pada segala bidang ikut mensejahterakan masyarakatnya, angka indeks ini dipakai untuk mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Adapun IPM Kab. Pidie Jaya dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia Kab. Pidie Jaya dan Aceh, 2019-2021
Sumber: <http://pidiejayakab.go.id/>

Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2021 adalah sebesar 73,60 persen. IPM Kabupaten Pidie Jaya lebih tinggi dibandingkan

dengan IPM rata-rata Aceh sebesar 72,18, dengan peringkat ke lima se-provinsi Aceh. Kategori IPM Kabupaten Pidie Jaya termasuk dalam kategori tinggi. Lebih rinci, terdapat beberapa indikator yang diperlukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan rakyatnya sebagai tujuan utama pemerintah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki seperti potensi alam, potensi keuangan, potensi pendidikan dan sebagainya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Penghitungan IPM mengalami penyempurnaan metodologi, capaian IPM metode baru terbentuk dari komponen Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (PPD). Secara umum, semua komponen menunjukkan peningkatan kuantitatif di tahun 2021 dimana AHH meningkat menjadi 70,18 tahun. HLS meningkat menjadi 14,97 tahun.

RRLS juga mengalami peningkatan dari 9,33 di tahun 2020 menjadi 9,34 di tahun 2021. Sementara itu, pengeluaran per kapita meningkat dari 10,07 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 10,29 juta rupiah pada tahun 2021, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini.

Tabel 4.1 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kab. Pidie Jaya, 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,06	70,14	70,18
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,54	14,82	14,97
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,04	9,33	9,34
4	Pengeluaran Perkapita (Juta Rupiah)	10,36	10,07	10,29

Sumber: <http://pidiejayakab.go.id>

4.2. Program UPPKS

Cikal bakal UPPKS dimulai sejak 1976 melalui program *Community Incentive Project* (CIP). Penggarapan CIP dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan desa secara keseluruhan dengan memberikan berbagai ragam insentif bagi masyarakat pedesaan atas prestasi kesertaan ber-KB, seperti membangun jamban keluarga, pembuatan sarana jalan, sarana air bersih, bantuan modal kerja dan sebagainya. Kegiatan ini lebih dikenal dengan nama *Income Generating* atau kegiatan Peningkatan Pendapatan Keluarga (P2K), dan kemudian di masyarakatkan dengan nama Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)⁴¹.

Di awal tahun 1990 UPPKA diubah menjadi UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dengan cakupan lebih luas, antara lain dengan melibatkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB, Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang dikelompokkan sebagai keluarga sangat miskin,

⁴¹ BKKBN Sulut, Sejarah Berdirinya UPPKS, <http://sulut.bkkbn.go.id/> diakses pada 15 November 2023

Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga yang dikelompokkan sebagai keluarga miskin, Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator, Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga yang dikatakan sudah mampu secara ekonomi namun belum dapat aktif memberikan sumbangan material secara teratur dan keluarga lain yang peduli menjadi anggota UPPKS. Program UPPKS mengakomodasikan upaya pemberdayaan usaha ekonomi keluarga atau rumah tangga miskin untuk meningkatkan pendapatan keluarga, para perempuan khususnya ibu rumah tangga miskinlah yang menjadi sasaran utama UPPKS⁴²

Pada dasarnya UPPKS merupakan kelompok usaha produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga atau masyarakat yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera. UPPKS di Desa Udeung ini sendiri didirikan pada tahun 2014 dan bertahan sampai tahun 2021. Adapun anggota dari program tersebut berjumlah 21 orang, 17 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Adapun rentang usia para anggota yang terlibat dalam program UPPKS ini terdiri dari 22-63 tahun.

Melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) peran perempuan dalam peningkatan perekonomian keluarga diharapkan dapat efektif. Dalam kelompok UPPKS mereka bekerja sama untuk mampu mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk menambah pendapatan keluarga. Pada hakikatnya peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan keluarga, merupakan terobosan untuk mempercepat transformasi kegiatan sosial ekonomi. Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui

⁴² BKKBN Jogja, *Info UPPKS*, <https://yogya.bkkbn.go.id/> di akses pada 15 November 2023

kelompok ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat dan keterampilan perempuan dalam bidang usaha ekonomi produktif.

Peran setiap anggota dalam suatu kelompok UPPKS yang ada di Desa Udeung Kab. Pidie Jaya tentu mempunyai pengaruh yang besar dalam menunjukkan kekompakan dan kemajuan serta kesuksesan yang diraih. Namun, tidak menutup kemungkinan pendamping kelompok memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan perempuan sehingga kelompok UPPKS di Desa Udeung Kab. Pidie Jaya ini berjalan sukses sesuai harapan. Kerja sama yang dijalin antar pengurus, anggota serta pendamping kelompok sebagai pekerja sosial memberikan tanda sebuah proses pemberdayaan perempuan melalui kelompok usaha ini berjalan sukses atau tidaknya program tersebut.

Sejak kelompok UPPKS di Desa Udeung Kab. Pidie didirikan, setiap anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok per-anggota disepakati sebesar Rp.20.000,-/orang dan simpanan wajib Rp. 10.000,-/orang. Sedangkan simpanan suka rela tergantung kemampuan anggota masing-masing.

Pada awal pembentukan UPPKS di Desa Udeung Kab. Pidie Jaya, kelompok tersebut mengajukan pinjaman awal sebagai modal usaha berupa Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga (KUKESRA) dan Tabungan Keluarga Sejahtera (TAKESRA) melalui BKKBN Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp. 300.00,-. Selain itu, kelompok UPPKS Desa Udeung kab. Pidie Jaya juga menerima bantuan modal dari BKKBN sebesar Rp. 5.000.000,-.

Kemudian pada tahun 2017, kelompok UPPKS Desa Udeung diberikan kesempatan kembali oleh BKKBN melalui dana Kredit Pengembangan Kelompok

Usaha (KPKU) dan KPKU plus sebesar Rp. 25.000.000,- dan diangsur selama 3 (tiga) tahun, dengan besaran jasa 1% dengan sistem bunga menurun. Yang keseluruhannya sudah diselesaikan dan diangsur dengan baik dan lancar tanpa tunggakan.

Pada tahun 2020 kelompok UPPKS Desa Udeung Kab. Pidie Jaya mendapat pinjaman dari PNPM sebesar Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan dan besaran jasa 12% pertahun. Dan semuanya telah terealisasi dengan baik tanpa ada tunggakan.

Terdapat beberapa kegiatan yang diadakan oleh UPPKS dari semenjak didirikan hingga di tahun terakhir UPPKS ini berjalan di antaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Daftar Kegiatan UPPKS Desa Udeung Kab. Pidie Jaya

No	Nama Kegiatan	Masa Kegiatan	Jumlah Anggota	Alasan Kegiatan Berakhir
1	Pembudidayaan Udang	2015-2021	21	- Pembibitan Udang Gagal - Banjir - Cuaca Buruk
1	Pengolahan Udang Menjadi Kerupuk	2015-2021	21	- Pembibitan Udang Gagal - Cuaca Buruk
2	Pembudidayaan Kepiting Lunak	2015-2019	21	- Populasi Kepiting Langka
3	Pengolahan Ampas Padi Menjadi Arang	2015-2017	21	- Minat Masyarakat Kurang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, semenjak program UPPKS ini didirikan dari tahun 2014-2020 terdapat 4 kegiatan yang dijalankan oleh program UPPKS. Adapun anggota dari program tersebut berjumlah 21 orang, 17 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Kegiatan pembudidayaan udang mempunyai tingkat keberhasilan yang dapat menjadi perhitungan, mengingat

udang sendiri merupakan komoditi yang sering di cari masyarakat, baik untuk dikonsumsi sehari-hari maupun pada acara tertentu.

Sejak program UPPKS turut memberikan dana, masyarakat mampu mendapatkan panen yang berlimpah dikarenakan pembibitan yang berlimpah pula. Selain itu, masyarakat juga mampu menjual hasil panen mereka keluar daerah dimana sebelumnya hasil panen udang hanya dijual di daerah sekitar tempat tinggal mereka saja. Adapun masyarakat yang dulunya sempat tidak melakukan pembibitan sama sekali karena terhalang modal kini dapat melakukan pembibitan kembali karena dana yang telah diberikan. Hasil panen dari udang tersebut juga turut dijadikan sebagai olahan kerupuk dengan rasa yang gurih. Namun sayangnya, pembibitan udang seringkali mengalami kegagalan pembibitan hal ini karena, cuaca buruk yang menyebabkan banjir yang menyebabkan tambak masyarakat ikut banjir dan membuat bibit udang yang belum siap dipanen lepas, hal ini tentunya menyebabkan masyarakat bahkan program UPPKS itu sendiri mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya.

Kegiatan lain yang turut diadakan oleh program UPPKS itu sendiri adalah pembudidayaan kepiting lunak. Namun kegiatan tersebut tidak berlangsung lama karena, indukan dari kepiting menjadi sulit untuk didapatkan. Adapun kegiatan pengolahan ampas padi menjadi arang juga sempat dijalankan oleh program UPPKS namun sayangnya, minat masyarakat terhadap jenis arang ini masih sangat minim, masyarakat lebih menyukai arang tradisional yang berasal dari kayu dibandingkan dengan arang yang berasal dari ampas padi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa aparat desa serta masyarakat desa Udeng tentang program UPPKS dari BKKBN diperoleh

kesimpulan dari pertanyaan yang diberikan yaitu desa Udeung mengalami perubahan dari dua tahun terakhir, sebelum dan sesudahnya program UPPKS ini diberikan terhadap desa Udeung ada perubahan signifikan yaitu pada bidang perekonomian masyarakat serta perindustrian masyarakat, banyak masyarakat terutama para perempuan mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, bahkan mereka dapat menyisihkan sebagian penghasilan yang mereka dapatkan untuk ditabung. Namun disamping hal tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi masyarakat dalam memahami program tersebut yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dalam materi yang disampaikan serta ada beberapa masyarakat yang buta huruf. Meningkatnya nilai politik di desa Udeung menjadi salah satu keunggulan dari program ini serta membuat peran ibu rumah tangga bertambah seperti pada bidang pengolahan hasil tambak mereka yang diolah menjadi berbagai olahan yang dapat membantu perekonomian di desa, keluarga maupun individual. Selain itu, beberapa masyarakat mengeluh terkait dengan kurang tepatnya sasaran dana yang diberikan oleh pemerintah.

4.3. Peningkatan Pendapatan Keluarga Kelompok UPPKS Desa Udeung Kab. Pidie Jaya

Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antarlain : Jumlah faktor produksi yang dimiliki dan Harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar. Hasil dari penelitian pemberdayaan perempuan kelompok UPPKS Desa Udeung Kab. Pidie Jaya ini dalam tujuannya tercapai dengan bukti bahwa adanya peningkatan pendapatan keluarga setelah adanya kegiatan kelompok UPPKS ini. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya produksi karena permintaan pasar yang cukup banyak. Kuantitas produksi sudah ditetapkan

jumlahnya, namun pasar kadang meminta lebih produksi dari jumlah biasanya. Selain itu, luasnya pengiriman produksi turut menjadi faktor dalam produksi yang banyak. Kesuksesan dalam produksi yang hasilnya meningkatkan pendapatan.

Kelompok UPPKS Jaya Udeung di Desa Udeung Kab. Pidie Jaya berhasil meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga mereka dengan adanya modal dari UPPKS, pemodalannya tersebut membuahkan hasil yang cukup besar, dimulai dari ekspor udang ke luar daerah, serta pengolahan udang menjadi kerupuk khas udang di Desa Udeung Kab. Pidie Jaya itu sendiri. Selama ini, pemilik tambak mendistribusikan hasil panen hanya ke daerah-daerah disekitar tempat tinggal mereka saja. Selain itu, hasil panen yang dihasilkan tidak dimanfaatkan untuk dijual ke dalam bentuk pangan lainnya, udang hanya dijual dalam bentuk mentah saja dikarenakan keterbatasan modal dan pengetahuan. Semenjak program UPPKS dijalankan di Desa Udeung Kab. Pidie Jaya, udang turut diolah menjadi kerupuk udang. Peningkatan pendapatan ini dibuktikan dengan meningkatnya produksi karena permintaan pasar yang cukup banyak dari kuantitas produksi yang sudah ditetapkan jumlahnya.

Program UPPKS turut menjalankan kegiatan lainnya selain pengolahan udang menjadi kerupuk udang yaitu : pembudidayaan kepiting lunak dan pemanfaatan ampas padi menjadi arang namun, kegiatan ini tidak berlangsung lama, hal ini karena pembudidaya kepiting lunak mengeluhkan pembudidayaan yang lama, selain itu untuk mendapatkan kepiting lunak petambak harus menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum panen dilakukan, yang menyebabkan kepiting-kepiting tersebut tidak sempat menjadi induk kepiting sebelum di panen. Arang yang dihasilkan dari ampas padi jarang digunakan oleh

masyarakat setempat dikarenakan arang dari kayu lebih bagus jika dinilai dari segi kualitasnya. Selain itu, aroma yang dihasilkan dari proses pembakaran arang kayu mempunyai aroma pembakaran yang khas.

Luasnya lahan produksi juga menjadi faktor utama dalam proses produksi pengolahan udang. Kelompok Jaya Udeung UPPKS mampu memproduksi kerupuk udang dengan kuantitas yang banyak dikarenakan pemasaran yang cukup luas tidak hanya di daerahnya sendiri tetapi juga sudah mencapai luar daerah. Keberhasilan dalam pengolahan udang untuk meningkatkan pendapatan oleh kelompok UPPKS pengolahan udang ini juga dilihat dari keuntungan yang didapatkan, keuntungan tersebut didapat dengan jumlah yang berbeda, namun keuntungan tersebut membuktikan adanya peningkatan pendapatan ibu-ibu di Desa Udeung, baik untuk kelompok maupun bagi individu, hal ini dibuktikan dengan kesehariannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder, bahkan tersier cukup terpenuhi sehingga keuntungan yang didapatkan tidak hanya digunakan pada kebutuhan wajib, selain itu hal ini juga dibuktikan dengan ibu-ibu yang dapat menyisihkan keuntungannya untuk ditabung atau disimpan.

Suksesnya penelitian dengan pemberdayaan perempuan ini tergantung pada kerja sama antar individu yang dalam penelitian ini kerja sama antar pengurus, anggota dan pendamping kelompok, semakin baik komunikasi yang dijalin, semakin baik pula kerja sama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pemberdayaan perempuan yaitu kesejahteraan keluarga.

Program-program pemberdayaan perempuan ditujukan agar para perempuan khususnya ibu-ibu dengan latarbelakang yang tidak bercukupan, dapat

mengeluarkan diri dari lilitan kemiskinan. Ibu rumah tangga yang menjadi anggota UPPKS Udeung Jaya berasal dari latar belakang yang berbeda, namun mayoritas dari mereka masuk ke dalam katagori keluarga sejahtera dengan perekonomian rendah.

Pemerintah melalui BKKBN menggulirkan bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok UPPKS terhadap ibu-ibu di Desa Udeung, adapun kendala yang dihadapi terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh UPPKS adalah masalah perizinan atau belum berbadan hukum. Salah satu persyaratan untuk memperoleh bantuan tersebut yaitu setiap kelompok UPPKS di Desa Udeung harus memiliki AD/ART dan berbadan hukum, jika belum berbadan hukum, pihak BKKBN sendiri menganjurkan ibu-ibu untuk bergabung dengan lembaga yang sudah berbadan hukum contohnya koperasi. Program ini merupakan program dari pemerintah yang perdana, umumnya bersumber dari berbagai pendanaan seperti APBN dan APBD. Penyalurannya dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Pelaksanaan UPPKS ini disediakan untuk semua daerah dimulai dari perkotaan sampai pendesaan seperti desa Udeung kecamatan Bandar Baru, terutama bagi kalangan yang perekonomiannya sulit dan serba keterbatasan. Salah satu kondisi keterbatasan yang di alami oleh ibu-ibu di Desa Udeung dipengaruhi oleh kepadatan pendudukan yang sangat padat, kepadatan penduduk menghadapkan ibu-ibu menghadapi berbagai persoalan multi-dimensi, sosial, kesehatan dan lingkungan. Umumnya semua persoalan tersebut tidak lepas dari permasalahan pokok yaitu ekonomi, apalagi sebagian besar masyarakat di Desa Udeung mempunyai mata pencaharian sebagai petani tambak dan petani sawah. Masyarakat terutama ibu-ibu Desa Udeung mencari

peluang usaha dengan memanfaatkan hasil lahan tambak sebagai sumber usaha. Masyarakat perlu mencari peluang usaha untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Sebagai contoh, kelompok Udeung Jaya memanfaatkan hasil panen dari tambak untuk diolah menjadi kerupuk dan di perjual belikan dan dikirim keluar daerah, baik dari kerupuk maupun dari udang mentah itu sendiri.

Keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan ini adalah ibu-ibu di Desa Udeung mempunyai sumber keuangan tambahan dengan tetap menjaga lingkungan dan melestarikan pembibitan udang dengan baik, serta mensejahterakan masyarakat di Desa Udeung itu sendiri. Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera memiliki tujuan di mana membangun ketahanan ekonomi, kemandirian dan pemberdayaan perempuan melalui kemampuan ibu-ibu dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Penelitian ini membahas dampak program UPPKS dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, ekonomi, budaya, dan sosial agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri agar mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan, oleh karena itu pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di

daerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari kemiskinan. Adapun umlah penduduk yang terdapat di Desa Udeung itu sendiri adalah sebanyak 365.332 jiwa, yang terdiri dari 122.111 jiwa laki-laki dan 243.221 jiwa perempuan, perkembangan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat. Adapun program-program pemberdayaan perempuan antaranya penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat, pelibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring semua program pembangunan yang ada, peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan agar mempunyai posisi tawar yang setara, memiliki akses, peluang, terlibat dalam pembangunan, serta meningkatkan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha dan pemodalannya dari UPPKS dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran (udang) yang lebih luas.

Pengendalian potensi-potensi yang ada baik potensi alam, sosial dan budaya sangat membantu pengarahannya. Banyaknya resiko hambatan ataupun rintangan untuk melalui proses perkembangan usaha ini, dengan pelatihan dan pendidikan serta modal dapat membantu masyarakat terutama ibu-ibu untuk membantu penghasilan kebutuhan harian. Anggota kelompok dalam pemodalannya UPPKS ini harus mampu berinovasi, kreatif dan berkembang secara terus-menerus sehingga dapat meningkatkan jiwa wirausaha bagi keluarganya.

Untuk mencapai kemandirian dan wirausaha dalam pelaksanaannya para anggota kelompok yang anggotanya lebih banyak perempuan mendapatkan pembinaan pendampingan, dengan dikeluarkannya program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera oleh Dinas PPKBPP dan PA menjadi peluang

masyarakat untuk bisa memanfaatkannya, masyarakat yang ingin berkembang namun tidak mempunyai modal modal dan pengetahuan yang cukup disinilah, peran dari program ini digunakan di mana nantinya akan ada pendampingan yang akan diberikan guna meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dijalankan.

4.4. Dampak Program UPPKS Terhadap Pemberdayaan Perempuan

4.4.1. Kesetaraan

- **Kondisi ril:** Di Gampong udeung sendiri kesetaraan Nampak terlihat antara ekonomi kalangan atas dan ekonomi kalangan bawah Nampak terlihat baik secara sosial maupun ekonomi tidak ada kesenjangan karena ada program UPPKS ini. Membuat program UPPKS sebagai pemersatu antar kedua kalangan, semua berbaur dan membantu untuk kemajuan Gampong udeung.
- **Dampak Positif:** Peluang yang terlihat dapat menumbuhkan nilai sosial maupun ekonomi dengan adanya program UPPKS ini.
- **Dampak Negatif:** Tantangan yang ada yaitu adanya baik buruk nya dari program UPPKS ini yang dapat menimbulkan perbedaan kesetaraan mungkin akan terjadi di Gampong udeung.

4.4.2. Partisipasi

- **Kondisi ril:** Di Gampong udeung sendiri tingkat partisipasi sangat tinggi antar masyarakat maupun antar gampong demi pengembangan serta kemajuan gampong itu sendiri, dengan adanya program UPPKS ini selain perempuan ada beberapa partisipan baik dari kaum laki-laki, remaja serta mahasiswa yang melakukan program kampus.

- **Dampak Positif:** Meningkatkan kepedulian antar kaum, masyarakat serta dibutuhkannya peran pemerintah dalam kegiatan dan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program UPPKS.
- **Dampak Negatif:** Adapun tantangan yang dihadapi kedepannya adalah kurangnya partisipasi baik dari pemerintah maupun masyarakat.

4.4.3. Keberlanjutan

- **Kondisi riil:** Dari dua tahun terakhir ini tidak adanya keberlanjutan dari program UPPKS ini dikarenakan banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak ada peningkatan baik secara ekonomi maupun sosial serta banyaknya masyarakat yang beralih profesi dari tambak ke bidang pertanian.
- **Dampak Positif:** Dari keadaan riil yang saya dapat informasi dari masyarakat gampong udeung, kemungkinan besar tidak adanya peluang dari program UPPKS ini baik tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya.
- **Dampak Negatif:** Tantangan yang akan dihadapi yaitu tidak adanya distributor dari hasil UMKM, minimnya dana yang diberikan oleh pemerintah serta tidak adanya dampak yang diberikan terhadap kemajuan kreatifitas kaum perempuan dalam program UPPKS ini.

4.4.4. Kemandirian

- **Kondisi riil:** Tingkat kemandirian meningkat, baik untuk tingkat gampong maupun masyarakat, baik kalangan perempuan serta kalangan laki-laki. Terjadinya peningkatan dalam kemandirian ini banyak masyarakat semakin percaya serta berfikir positif tentang adanya program UPPKS ini.
- **Dampak Positif:** Kemungkinan besar peningkatan kemandirian masyarakat terutama dalam bidang kreatifitas ibu-ibu dalam pemanfaatan hasil

tambak tanpa adanya bimbingan dari pihak manapun baik pemerintah maupun mahasiswa.

- **Dampak Negatif:** Berkurangnya kemandirian perempuan dalam kreatifitas pengolahan hasil UMKM hasil tambak.

4.5. Pembahasan

Hasil penelitian yang saya lakukan terdapat beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebagai kuisisioner terhadap pihak pemberi program yaitu BKKBN, aparatur desa gampong Udeung serta masyarakat. Dari pertanyaan yang saya ajukan ada yang memberi respon positif serta ada yang memberikan respon negatif terhadap program UPPKS ini. Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah Apa saja keunggulan/kelebihan dari program UPPKS? Pihak BKKBN memberikan penjelasan sebagai berikut pemberian bantuan bukan hanya dalam bentuk materi melainkan juga dalam bentuk peralatan usaha (material), pemasaran yang cepat, pengarahan yang diarahkan secara langsung serta cepat tangkap.

Pertanyaan selanjutnya yang saya berikan, apa saja kekurangan dari program UPPKS? Dana yang disalurkan oleh UPPKS minimum sehingga masyarakat mengeluarkan dana pribadi untuk menjalankan program, kurang luasnya pemasaran yang tersedia sehingga masyarakat (UPKKA) harus mencari konsumen atau distributor sendiri.

Penyebab atau yang menjadi penghambat tidak berjalannya program UPPKS di beberapa daerah terutama di desa Udeung? Adanya faktor selisih paham pendapat antara kelompok program (UPKKA) dengan masyarakat yang kontra dengan program ini, tercemarnya lingkungan tambak sehingga penyaluran bahan baku tambak semakin menipis dan terhambatnya pengolahan.

Apakah ekonomi masyarakat meningkat atau menurun setelah program UPPKS ini dibuat? Pertama program ini berjalan, perekonomian masyarakat di desa Udeung meningkat lebih baik terutama bagi kalangan ibu-ibu UPKKA, mereka sudah mampu membantu perekonomian keluarga dan menurunkan tingkat pengangguran. Untuk saat ini setelah saya melakukan penelitian banyak dari masyarakat yang mengeluh bahwa mereka kewalahan dikarenakan peminat dari hasil usaha mereka seperti kerupuk udang sedikit peminat dan hampir tidak ada peminat serta tidak ada lagi kekompakan dalam kelompok.

Dana yang dialokasikan di provinsi aceh berapa banyak terkhusus di desa Udeung? Dana yang dialokasikan dari hasil penelitian saya pihak BKKBN menyampaikan bahwa dana yang dialokasikan tidak menentu dikarenakan kurangnya peminat program UPPKS di aceh sekitar 50%. Peminat program ini menurun dari dua tahun sebelumnya yaitu 73%, begitu yang disampaikan oleh pihak BKKBN yaitu Ibu Mimi S.E.



Gambar 4.2. Wawancara dengan pihak BKKBN

Selanjutnya saya melakukan wawancara dengan perangkat desa atau aparatur desa untuk mengetahui kebenaran tentang program UPPKS ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, Bagaimana keadaan desa Udeung setelah adanya program UPPKS ini?, Bapak Muhammad Yunus selaku geuchik gampong Udeung memberi pernyataan, Keadaan desa Udeung dengan adanya proram ini terhambat karena sebagian masyarakat berasumsi program ini tidak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Program UPPKS ini berjalan sejak 2 tahun yang lalu. Namun, terdapat kendala yaitu di bagian pembibitan contoh bibit udang banyak yang mati karena banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur cara pembibitan udang sehingga beberapa petani mengalami gagal dalam usaha tambak udang dan gagal panen dan kalau berhasil hasilnya tidak maksimal untuk pembuatan produk pengolahan seperti kerupuk, udang kering serta kepiting lunak.

Target utama dari program UPPKS ini adalah ibu rumah tangga, cara ibu-ibu memahami program tersebut bagaimana. Apakah memiliki kendala?, Kendala yang dihadapi adalah ada beberapa masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal membaca serta kurang pahami materi yang di berikan oleh pemateri dari pihak BKKBN seperti, ada masyarakat yang buta huruf, tidak dapat melihat (tunanetra) serta gagap teknologi (GAPTEK).

Berikutnya saya bertanya bagaimana cara atau solusi bapak dalam mengatasi masalah dan kendala tersebut bagaimana?, dengan cara pemberian materi langsung yang mudah dipahami oleh warga atau msasyarakat setempat dengan cara pemberian materi dialihkan kepada ibu-ibu PKK setempat yang mengerti keadaan dan kekurangan dari Desa Udeung.



Gambar 4.3. Wawancara dengan Geuchik Desa Udeung

Untuk memaksimalkan hasil penelitian yang dilakukan, saya melakukan wawancara langsung dengan masyarakat desa Udeung, ada 11 pertanyaan yang saya ajukan kepada masyarakat mengenai program UPPKS ini, pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah apakah program UPPKS ini dapat meningkatkan hasil sumber daya masyarakat? rata-rata dari masyarakat banyak yang merespon dengan jawaban, program ini dapat meningkatkan hasil sumber daya terutama di bidang perekonomian tetapi dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya dan dua tahun sesudahnya tidak dapat meningkatkan sumber daya karena banyak dari beberapa masyarakat yang beralih profesi. Adapun pertanyaan berikutnya adalah, dengan adanya program UPPKS ini apakah pemasukan dan pengeluaran dalam segi ekonomi masyarakat mampu dikontrol dengan baik? hanya sebagian masyarakat saja yang dapat meningkatkan atau mengontrol pemasukan serta pengeluaran dikarenakan program ini berlaku tidak merata atau menyeluruh.

Apakah program UPPKS ini mampu membangkitkan nilai politik antar masyarakat? Hasil survey yang saya lakukan dengan bertanya langsung dengan

masyarakat program ini dapat meningkatkan atau membangkitkan nilai politik antar masyarakat salah satu contohnya masyarakat sekitar gampong Udeung yang mengikuti program UPPKS ini yang mendapat arahan dari geuchik gampong tersebut untuk mengikuti serta membantu kampanye gampong Udeung. Hal ini merupakan nilai politik.



Gambar 4.4. Wawancara dengan ibu PKK Desa Udeung

Dari segi sosial, apakah program ini mampu meningkatkan nilai sosial baik di dalam ruang lingkup masyarakat ataupun didalam ruang lingkup keluarga? Bapak Muhammad Yunus memberi pernyataan, Dari segi pandang masyarakat program ini dapat meningkatkan nilai sosial salah satu contohnya bantuan penyaluran dana serta kunjungan terhadap korban seperti kebakaran rumah dalam bentuk sandang, pakan serta pangan. Gotong royong yang melibatkan ibu PKK yang mengikuti program UPPKS.

Dengan adanya program UPPKS ini, masalah apa saja yang dapat terselesaikan baik dari segi ekonomi dan sosial? terbantunya perekonomian

masyarakat, menonjolkan peran wanita, serta menambah wawasan anak-anak muda dalam membantu program UPPKS.



Gambar 4.5. Hasil Tambak Masyarakat Desa Udeung

Selain dari pada ibu-ibu yang berperan dalam program ini, apakah ada bapak-bapak atau anak-anak yang ikut berpartisipasi? dalam program ini di desa Udeung ini banyak bantuan partisipasi serta berperan membantu yaitu bapak-bapak, remaja serta mahasiswa dalam pemberian materi pungkas ibu-ibu gampong Udeung.

Saya bertanya lebih lanjut untuk mengetahui apakah mahasiswa memiliki peran serta keikutsertaan dalam program UPPKS ini dengan pertanyaan, dalam program ini, apakah ada beberapa mahasiswa atau organisasi yang ikut berpartisipasi baik dari mensosialisasikan atau membantu dalam program ini? Ada beberapa mahasiswa dari universitas perguruan tinggi yang berperan dalam program ini seperti mahasiswa yang melaksanakan program kampus serta alumni yang ikut serta mengambil peran seperti memberi bantuan dalam bentuk materi maupun material.

Potensi seperti apa yang berkembang setelah adanya program ini?. Potensi ibu rumah tangga berkembang serta bertambah salah satunya menambah wawasan kewirausahaan di bidang perindustrian terutama pemanfaatan dari hasil tambak udang.

Program UPPKS ini bagian program dari pemerintah yaitu dinas BKKBN. Apakah ada pihak ketiga atau sukarelawan yang memberikan atau membantu baik secara finansial atau material? tidak adanya pihak ketiga atau sukarelawan yang membantu untuk program UPPKS ini, begitu yang dikatakan oleh pak geuchik gampong Udeung Muhammad Yunus.

Apakah ada hambatan dalam penerimaan program UPPKS ini? hambatan yang dialami adalah adanya salah sasaran penerimaan dana yang tidak tepat seperti kalangan atas atau ekonomi diatas rata-rata berkecukupan yang menerima program ini.

Solusi seperti apa yang diberikan oleh pemerintah ataupun aparatur desa dalam mengatasi masalah hambatan penerima program ini?. Solusi dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu harus transparansinya pemberian dana yang diketahui oleh masyarakat seperti pembagiannya harus dimusyawarahkan terlebih dulu oleh aparatur desa dan masyarakat untuk mengetahui siapa yang siap untuk menerima dana dari program ini, pungkas pak geuchik gampong Udeung Muhammad Yunus.

BAB V

PENUTUP

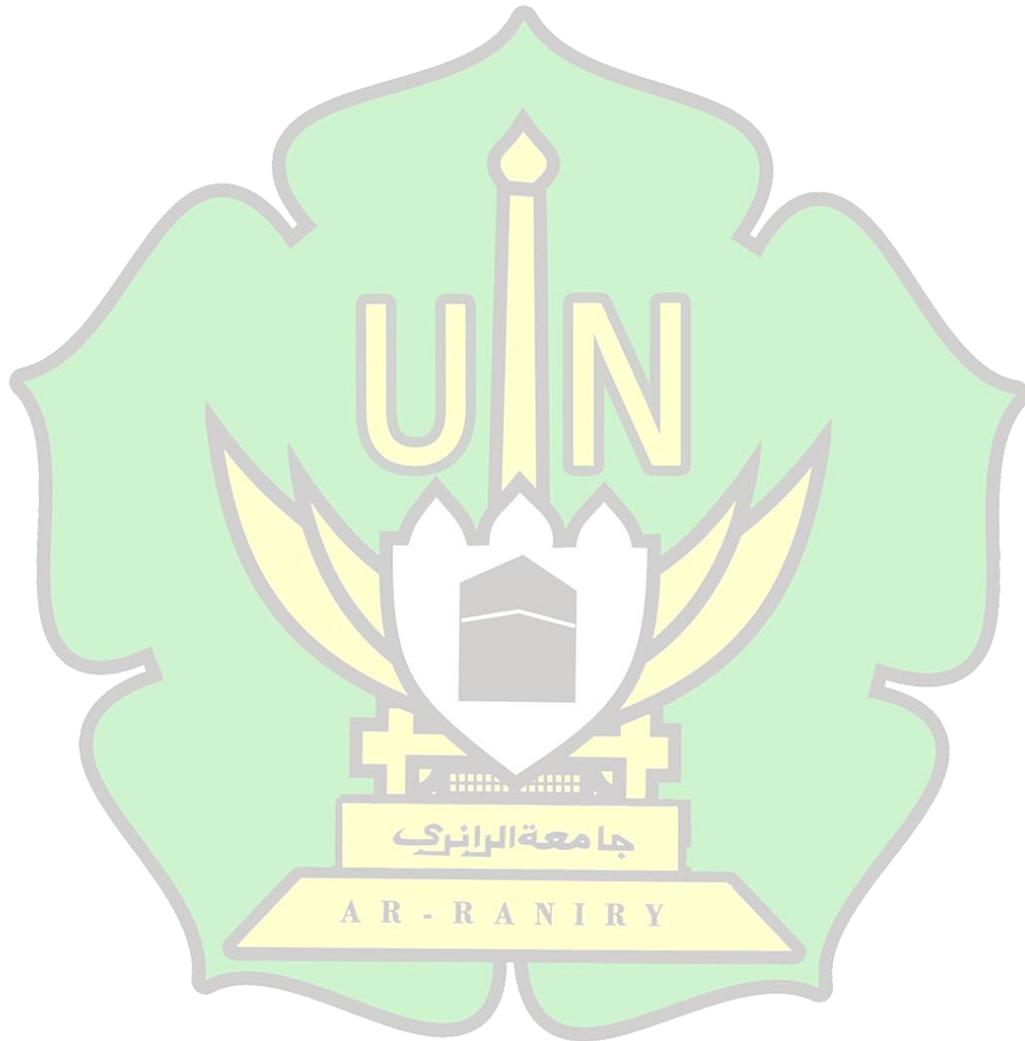
5.1. Kesimpulan

Program UPPKS yang ditawarkan BKKBN di Desa Udeung Kab. Pidie Jaya mempunyai dampak terhadap pemberdayaan perempuan. Namun, dampak yang ditimbulkan dari program ini sendiri tidak jauh dari dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positif dari program UPPKS adalah perekonomian masyarakat terutama para perempuan, dimana mereka dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan dapat menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk ditabung, selain itu para perempuan juga ikut disertakan dalam proses pengambilan keputusan yang akan diterapkan di Desa Udeung itu sendiri. Adapun dampak negatif dari program UPPKS ini adalah, penyaluran dana yang tidak tepat sasaran menyebabkan kesenjangan di dalam masyarakat khususnya para perempuan. Selain itu, penyampaian materi yang dilakukan oleh pihak UPPKS bisa disebut hanya formalitas saja, karena pihak UPPKS menyampaikan materi tanpa memperhatikan kondisi para masyarakat yang ada di Desa Udeung yang memiliki kekurangan seperti tuna netra, buta huruf bahkan gagap teknologi. Selain itu pihak UPPKS sendiri tidak menyediakan wadah pelatihan khususnya pelatihan pembibitan udang, pelatihan yang diadakan hanya sebatas cara pengelolaan dana yang di berikan.

5.2. Saran

Program UPPKS harus dibenahi baik prosedur maupun penerapannya, diharapkan kedepannya program UPPKS ini dapat menyediakan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana mengelola hasil tambak maupun komoditi kain yang

terdapat di Desa yang hendak diberikan dana. Selain itu, diharapkan agar program UPPKS ini lebih transparan dalam pelaksanaannya, baik berhubungan dengan dana yang disalurkan maupun pihak-pihak yang akan menerima bantuan dari program UPPKS itu sendiri.



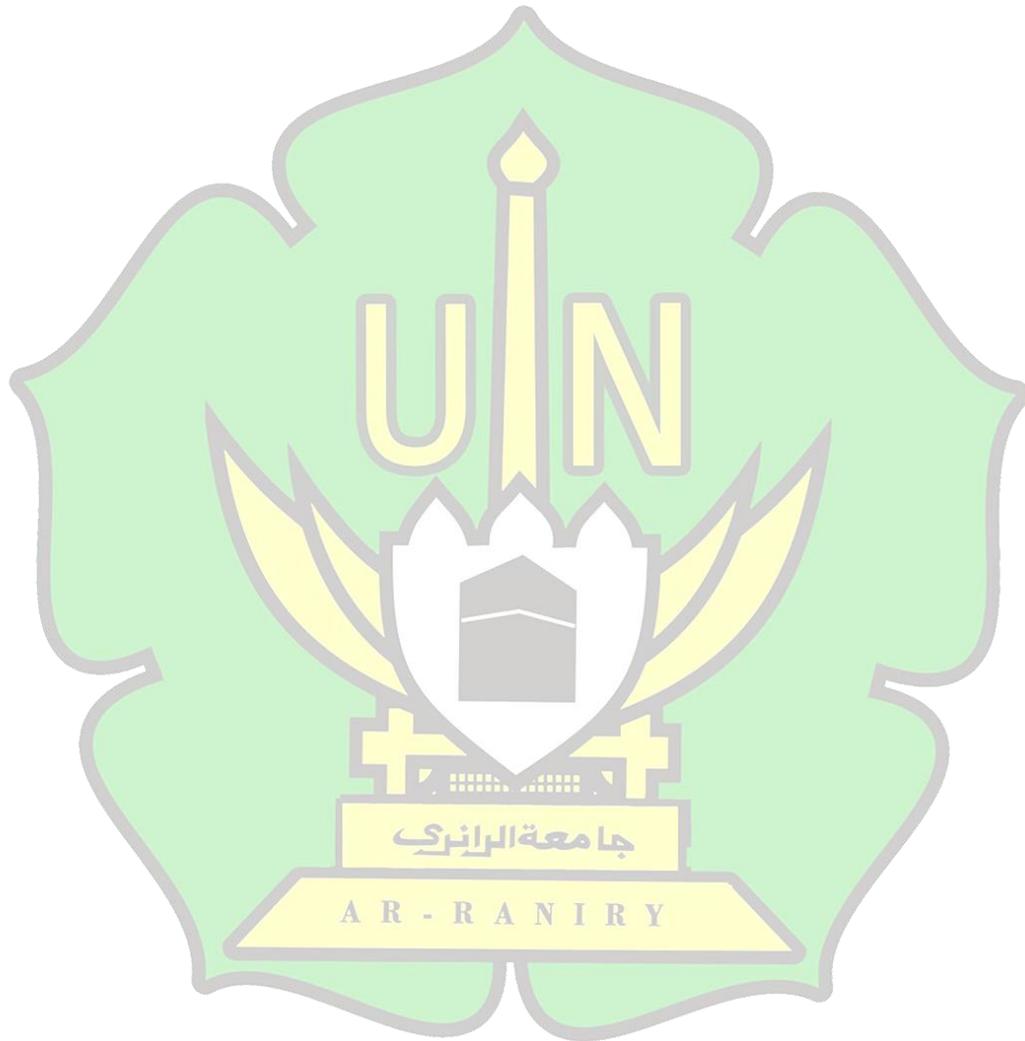
DAFTAR PUSAKA

- Astrid Wijaya, Apakah “Gender” Hanya Pemberdayaan Perempuan.
<http://www.p2kp.org/> diakses pada tanggal 05 Desember 2023.
- Bhinadi, Ardito. 2017. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta:Deepublish
- BKKBN Sulut. *Sejarah Berdirinya UPPKS*. <http://sulut.bkkbn.go.id/> diakses pada tanggal 15 November 2023.
- BKKBN Jogja. *Info UPPKS*. <http://yogya.bkkbn.go.id/> diakses pada 15 November 2023.
- BPPKB Kajen, *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*, <http://bppkbkajen.blogspot.co.id/> diakses pada 05 Desember 2023.
- BPS. Indeks Kemiskinan. <https://www.bps.go.id/> diakses pada 04 Desember 2023
- Hasibuan, Ali F. 2015. *Pemberdayaan UPPKS Cendrawasih Berbasis Pencatatan Keuangan di Kota Tanjung Balai*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2018. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indeks Pembangunan Manusia Kab. Pidi Jaya diakses di <http://pidiejayakab.go.id/> pada tanggal 18 November 2023.
- Soetrisno, Loekman. 2020. Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan. Hlm 92-93.

- Mardhatillah, Muntaha. 2021. Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKKS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*.
- Mardikanto & Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta
- Multifiah. 2009. Analisis Pengaruh Bantuan ZIS Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Muslim yang Miskin (RTMM). Unibraw Malang: *Jurnal Ekonomi Islam*
- Ngurah, Marhaeni, A.A.I 2013. *Efektifitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Denpasar Barat*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.
- Purwanto, A., & Taftazani, B. M. 2018. *Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Pekerja K3L*. Universitas Padjajaran.
- Qudsiah, W. L. & Gustiawati, S. (2017). Peranan wanita karir dalam membantu kebutuhan keluarga menurut mazhab Syafi-iyah. *Mizal Journal of Islamic Law*, 1(2), 155-172.
- Remiswal, Isbandi. 2018. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Rosyda, Mawar D., Arman Arman,. 2022. Analisis Strategi Pengembangan Minuman Herbal Instan (Studi Kasus: UPPKS Madya XI Karawang). *Jurnal Bioindustri*.
- Salman, Ismah. 2015. *Keluarga Sakinah Dalam 'Aisyiah: "Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah"*, Jakarta, PSAP Muhammadiyah.

- Soestrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Cet. 4.
- Suharto, Edi. 2013. *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan.
- Sulistiyowati, Tutik. 2015. *Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesional dan Daya Saing untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja*. Jurnal Perempuan dan anak.
- Sukesi, Keppi. 2015. *Gender dan Kesmiskinan di Indonesia*. Malang: UB Press
- Sumanti, Titik. 2010. *Strategi Nafkah Rumah Tangga dan Posisi Kaum Perempuan dalam Secercah Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan (Sebuah Kajian)*. Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Keluarga. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sunartiningsih, Agnes (ed). 2004. *Memberdayakan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suparjan & Hempri, S. 2013. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaa*. Yogyakarta: Adita Media.
- Susanti, Anityas Dian. 2015. *Pola Partisipasi Warga dalam Pengembangan Desa Wisata Umbul Sidomukti Kabupaten Semarang*, Universitas Diponegoro: ISSN: 08532877, Vol. 15 No. 1

Zakiah. 2020. *Pemberdayaan Perempuan Oleh Lajnah Wanita*. Jurnal Pengkajian masalah sosial keagamaan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

FOTO 3x4

Identitas Diri

Nama : Masrurrati
Tempat Tanggal Lahir : Desa Udeung 15 September 2000
Nomor Handphone : 081973399680
Alamat : Lambaro Skep, Syiah Kuala, Banda Aceh.
Email : masrurrati@gmail.com

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri Neulop Matee
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Bandar Baru
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Bandar Baru

Sertifikasi

1. Sertifikat Lomba Pidato Bahasa Arab
2. Sertifikat Baca Doa Siap Shalat
3. Sertifikat Lomba Cerdas Cermat SMP
4. Sertifikat Novel SMP

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Penelitian



